



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

SKRIPSI

**PERAN DAN FUNGSI UN WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI UGANDA (2014 -2021)**

Diajukan oleh:

Nesia Maya Mahardika

17323087

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**PERAN DAN FUNGSI UN WOMEN DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UGANDA (2014 -2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Guna Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Derajat S1 Hubungan



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Disusun oleh:

Nesia Maya Mahardika

17323087

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PERAN DAN FUNGSI UN WOMEN DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UGANDA (2014 -2021)**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Syarat Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

29 April 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
2. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nesia Maya Mahardika
No. Mahasiswa : 17323087
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi UN Women Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda (2014 -2021)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Mei 2021



Nesia Maya Mahardika

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Mama dan Almarhum Ayah

Atas segala kasih sayang, doa, kesabaran, kerja keras, dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas segala hal yang hanya bisa penulis terima hingga saat ini. Semoga akan segera tiba masa bagi penulis untuk membalas kasih sayang dan kebaikan yang telah dilimpahkan.

Kakak-kakak

Atas segala doa, kasih sayang, dukungan, ilmu, serta nasihat yang menjadi pedoman bagi penulis dalam menjalankan kehidupan.

Seluruh Keluarga Besar

Terima kasih atas, doa, kasih sayang, kepercayaan, dan kebaikan yang telah diberikan selama ini.

HALAMAN MOTTO

“The way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning.”

– Morrie Schwartz



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga akhir. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan yang sangat membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan ilmu, semangat, nasihat, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Ibu Gustri Eni Putri S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sampai di tahap ini, serta memberikan motivasi, nasihat, ilmu, dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah menyempatkan serta merelakan waktunya untuk terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya untuk waktu yang melelahkan dan tersita dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, mendapatkan berkah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk ilmu, serta pelajaran yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh karyawan di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kenyamanan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Mama tercinta, terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayang yang tiada henti dicurahkan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini. Terima kasih atas doa yang senantiasa dipanjatkan, serta kepercayaan yang tak terhingga kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik di Universitas Islam Indonesia. Tanpa kerja keras dan pengorbanan yang telah diberikan, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Mama selalu diberikan berkah, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
9. Kakak-kakak dan ketiga keponakan penulis, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan kegembiraan yang telah diberikan.

10. Noviya Ayuning Tyas, sahabat yang selalu ada di segala kondisi. Terima kasih atas waktu, dukungan, telinga, dan bahu untuk penulis selama ini. Terima kasih selalu ada dalam jangkauan ketika dibutuhkan, dengan senang hati menenangkan dan mendengarkan setiap keluh kesah yang ada. Penulis tidak akan sampai di titik ini tanpa dukunganmu. Semoga diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir, dikaruniakan kesehatan, dan dapat meraih cita-cita yang diidamkan.
11. Gita Febriana Dila, Zhalika Liliandana, Kustya Afna Chairunnisa, dan Wafda Nanda Putri. Terima kasih atas waktu, dukungan, bantuan, dan kegembiraan yang diberikan selama masa perkuliahan. Masa yang sulit namun membahagiakan tersebut tidak mungkin dapat penulis lewati tanpa bantuan kalian. Semoga hubungan yang baik ini dapat terus terjalin meski kita sudah berada di jalan masing-masing. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dapat menjalani kehidupan yang kalian impikan.
12. Nanda Rizki Amaliah, rekan serumah yang selalu setia menemani. Terima kasih atas bantuan, waktu, hiburan dan kegembiraan yang telah diberikan. Malam-malam berbagi cerita dan berkeluh kesah itu tidak akan terlupakan. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semua cita-cita dikabulkan.
13. Aisyah Anggraini, Rosalina Jamayanti, Kamila Nur Afhati, dan Nirmala Nabila Putri. Terima kasih sudah menjadi penyokong dan pendukung utama untuk menyelesaikan tugas akhir. Sungguh bersyukur dapat

dipertemukan dengan kalian di masa-masa yang sulit ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir, dan dimudahkan dalam meraih mimpi-mimpi yang belum terwujud.

14. Seluruh pengurus Sedekah Sekitar UII tahun 2019/2020 dan 2020/2021, yang menjadi wadah bagi penulis untuk terus berkembang. Terima kasih atas segala pengalaman, pelajaran, ilmu, dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga SS UII bisa semakin maju dan tetap pada prinsip membantu sesama tanpa kecuali.
15. Seluruh rekan HI UII angkatan 2017, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan kegembiraan selama menjalankan masa perkuliahan. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan pada fase kehidupan selanjutnya.



ABSTRAK

Uganda memiliki sejarah panjang konflik sipil dan perang saudara yang menyisakan ketidakstabilan politik dan ekonomi negara. Keadaan tersebut membuat Uganda lebih memprioritaskan perkembangan ekonomi dan politiknya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, dan mengesampingkan permasalahan yang dianggap minor seperti pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan baru dijadikan prioritas oleh Uganda setelah menyadari keterkaitannya dengan keseimbangan politik dan ekonomi. Uganda kemudian mengundang UN Women masuk untuk membantu mengupayakan pemberdayaan perempuan bagi masyarakatnya. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 – 2021. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. UN Women berhasil memenuhi perannya sebagai instrumen, dan aktor independen. UN Women juga memenuhi fungsi artikulasi kepentingan, menciptakan norma, melakukan rekrutmen anggota, melakukan sosialisasi norma, menjadi penyedia informasi, serta memberikan bantuan operasional dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda.

Kata-kata kunci: UN Women, pemberdayaan perempuan, Uganda, konsep organisasi internasional

ABSTRACT

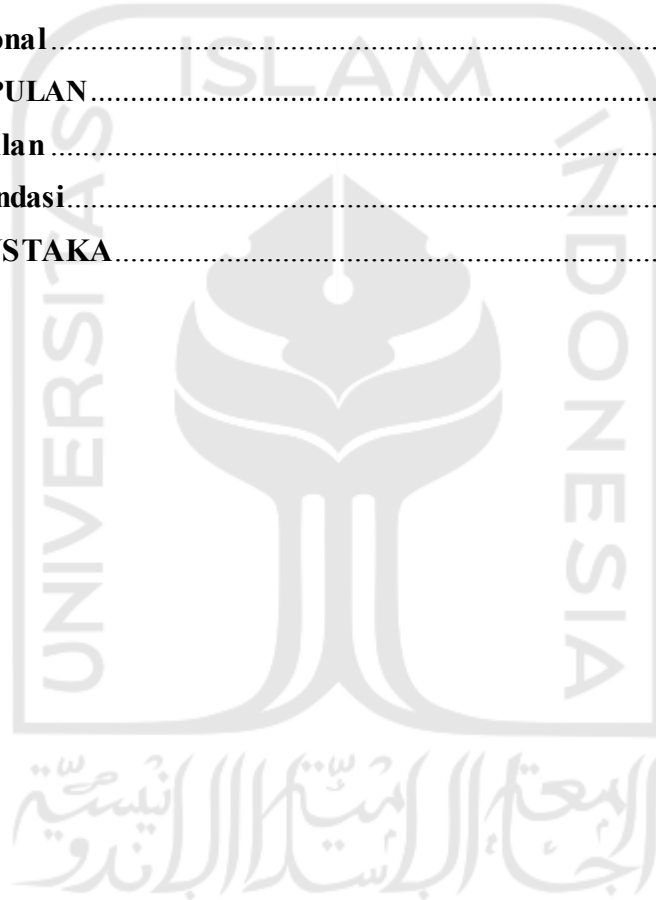
Uganda has a long history of civil conflict and civil war which has resulted in instability in the country's politics and economy. The circumstances make Uganda prioritize its economic and political development in order to catch up with other countries, also by setting aside issues that are considered minor, such as empowering women. Women's empowerment was made a priority by Uganda only recently, after realizing its relationship to its political and economic balance. Uganda, in turn, invited UN Women to come in and help work on women's empowerment for its community. This study seeks to analyze the role and function of UN Women in women empowerment efforts in Uganda in 2014 - 2021. The researcher uses the concept of international organizations proposed by Clive Archer. UN Women is known to have succeeded in fulfilling its role as an independent instrument and actor. UN Women also fulfills the function of articulating interests, creating norms, recruiting members, empowering the socialization of norms, providing information, and helping operations in efforts to empower women in Uganda.

Keywords: UN Women, women empowerment, Uganda, the concept of international organizations

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Signifikansi Penelitian.....	5
1.5. Cakupan Penelitian.....	5
1.6. Tinjauan Pustaka.....	6
1.7. Landasan Konseptual.....	10
1.8. Metode Penelitian.....	16
1.8.1. Jenis Penelitian.....	16
1.8.3. Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4. Proses Penelitian.....	17
BAB II PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UGANDA.....	18
2.1. Pemberdayaan Perempuan di Uganda.....	18
2.2. Profil UN Women.....	21
2.3. UN Women Sebagai Instrumen.....	22
2.3.1. Penyusunan Strategi Guna Mengatasi Kesenjangan Gender di.....	25
Bidang Pertanian.....	25
2.3.2. Pendampingan terhadap Lokalisasi dan Implementasi SDGs.....	29
2.4. UN Women Sebagai Arena.....	34

2.5. UN Women Sebagai Aktor Independen	37
BAB III FUNGSI UNITED NATIONS WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UGANDA	40
3.1 Artikulasi dan Agregasi Kepentingan	40
3.2 Norma	42
3.3 Rekrutmen	45
3.4 Sosialisasi	47
3.5 Pembuatan dan Pengesahan Kebijakan	49
3.6 Informasi	52
3.7 Operasional	54
BAB IV KESIMPULAN	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kesenjangan Gender pada Produktivitas Pertanian dan Keuntungan dari Kesetaraan Gender di Bidang Pertanian.....	27
Tabel 2: Enam Sektor yang Termasuk di dalam NPGEIs.....	33
Tabel 3: Kesimpulan Peran Dan Fungsi UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Di Uganda	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan yang rendah seperti di Afrika, masih terdapat banyak permasalahan mengenai kesejahteraan sumber daya manusianya. Bagi penduduk wanita, masalah yang harus dihadapi antara lain adalah mengenai ketidakberdayaan perempuan, terutama di negara Uganda. Uganda terletak di daerah Afrika Timur, dan sudah berkali-kali mengalami perang saudara dan berada di bawah kepemimpinan pemerintah yang diktator sejak masa kemerdekaannya di tahun 1962. Keadaan tersebut membuat Uganda lebih memprioritaskan perkembangan ekonomi dan politiknya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, dan mengesampingkan permasalahan yang dianggap minor seperti ketidakberdayaan perempuan.

Meski demikian, seiring dengan berkembangnya zaman Uganda mulai menyadari bahwa selain harus mengatasi masalah-masalah makro, pemberdayaan perempuan sebagai masalah minor juga perlu diperhatikan. Hal itu dikarenakan ketidakberdayaan perempuan dapat memberikan efek yang negatif di berbagai sektor, contohnya adalah rendahnya kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan, dapat berujung pada peningkatan angka pengangguran karena perempuan tidak memiliki dasar kemampuan untuk bekerja. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendaftaran di sekolah menengah di Uganda yang mengalami stagnasi sejak dengan persentase 28% saja sejak

tahun 2007 hingga 2017 (World Bank, 2020). Hal ini kemudian berakibat pada menurunnya persentase pekerja usia 15-24 tahun yang ada di Uganda dari 53% di tahun 2007 menjadi 51,3% saja pada tahun 2017 (World Bank, 2021). Oleh karena itu, Uganda kemudian mulai melaksanakan berbagai macam program pemberdayaan perempuan, baik itu dari pemerintahnya sendiri, maupun dari aktor non-pemerintah yang aktif dalam bidang yang bersangkutan.

Pada kasus di Uganda, UN Women digunakan negara untuk membantu memberdayakan masyarakat perempuan. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah dengan yaitu dengan memastikan bahwa semua perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam politik dan ekonomi, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Sama seperti negara-negara dengan keadaan politik yang tidak stabil dan sering mengalami konflik internal, Uganda menghadapi permasalahan ekonomi yang cukup serius. Kondisi ekonomi di Uganda mengalami kemerosotan ketika National Resistance Movement (NRM) mengambil alih pemerintahan melalui perang sipil pada tahun 1986. Keadaan terus berlanjut karena pada kurun waktu antara tahun 2000 hingga 2003, masyarakat Uganda yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan meningkat dari 34% menjadi sebanyak 38% (Ellis, Manuel, & Blackden, 2006). Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Uganda juga cukup rendah yaitu US\$6.193 miliar pada tahun 2000, dan menurun hingga US\$5.841 miliar pada tahun 2001 (World Bank Data, 2021).

Berangkat dari keadaan tersebut, Uganda menjadi salah satu negara pionir yang menyadari adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan permasalahan gender di Afrika sub-Sahara Afrika (Ellis et.al., 2006).

Uganda menyadari bahwa pemberdayaan perempuan perlu diupayakan untuk mengubah kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Kondisi tersebut seharusnya dapat dihindari jika perempuan lebih diberdayakan, misalnya dengan memberikan akses pendidikan yang setara. Ketimpangan akses ke pendidikan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi di lebih dari 100 negara selama tiga dekade menemukan adanya peningkatan sebanyak 1% dari jumlah perempuan yang menempuh pendidikan menengah, meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita hingga 0,3% (Ellis, Manuel, & Blackden, 2006). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan seharusnya lebih ditingkatkan lagi.

Meski demikian, pemerintah Uganda masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan di Uganda. Faktor terbesar terletak pada keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti dana, serta data dan informasi. Uganda kesulitan mendapatkan tenaga profesional yang dapat membantu dalam menyusun program-program pemberdayaan perempuan. Uganda juga memiliki keterbatasan dalam mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Masalah pendanaan juga menjadi hambatan pemerintah Uganda selanjutnya, karena keadaan ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah Uganda kemudian mengajak UN Women sebagai partner dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan, untuk mengatasi hambatan tersebut.

UN Women merupakan kependekan dari United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women adalah badan khusus buatan

PBB yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2021). UN Women berusaha menciptakan suatu standar global dalam kesetaraan gender, lalu bekerja bersama pemerintah dan masyarakat untuk membuat aturan, program, serta layanan yang dapat menjamin standar tersebut dapat tercapai dan menguntungkan perempuan di seluruh belahan dunia (UN Women, 2021). Salah satu wilayah yang menjadi perhatian penuh UN Women adalah Afrika Timur, karena perempuan di wilayah tersebut masih banyak yang tidak berdaya, tak terkecuali di Uganda. UN Women memiliki 8 area fokus strategis di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu kepemimpinan dan pemerintahan, pemberdayaan ekonomi perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, perdamaian dan keamanan, perencanaan dan anggaran, norma global, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta industri ekstraktif (UN Women, 2016).

Tidak semua dari unit yang ada dijadikan fokus oleh UN Women yang berada di negara tertentu. Hal ini bergantung pada kebutuhan dan kondisi perempuan di negara tersebut. Di Zambia misalnya, area fokusnya hanya di bidang industri ekstraktif saja, sehingga bidang lainnya sudah dapat digolongkan aman dan tidak memerlukan perhatian khusus dari UN Women (UN Women, 2016). Sementara itu di Uganda seluruh unit tersebut dijadikan fokus utama UN Women dalam memperbaiki keadaan dikarenakan situasi yang lebih pelik dan banyaknya sektor yang perlu diperbaiki sebelum perempuan di Uganda dapat mencapai standar kesejahteraan perempuan global (UN Women, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 – 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 – 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 – 2021.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai beberapa usaha pemberdayaan perempuan yang berbasis di Uganda memang sudah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang berusaha melihat bagaimana peran dan fungsi UN Women dalam pemberdayaan perempuan di Uganda. Penelitian ini juga menganalisis berbagai sektor yang telah menunjukkan peningkatan setelah dilakukan usaha pemberdayaan perempuan di dalamnya.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh tahun penelitian yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2021. Tahun 2014 digunakan sebagai acuan awal dikarenakan walau UN Women mulai berdiri sejak tahun 2010, namun data dan informasi baru tersedia di situs resmi UN Women pada tahun 2014. Tahun 2021 dipilih sebagai batasan akhir karena meski sempat terhambat oleh pandemi COVID-19,

namun UN Women masih tetap melakukan kegiatannya di Uganda. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh UN Women selama pandemi COVID-19 juga menunjukkan peran dan fungsi penting UN Women sebagai organisasi internasional.

Definisi pemberdayaan perempuan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan standar yang ditetapkan oleh UN Women, yaitu perempuan yang berdaya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam politik dan ekonomi, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Uganda kemudian dipilih menjadi negara yang diteliti karena merupakan negara pionir dalam menyadari keterkaitan antara permasalahan gender dan permasalahan yang dianggap besar, misalnya ekonomi dan politik. Uganda juga menunjukkan kemajuan yang pesat di bidang pemberdayaan perempuan jika dibandingkan dengan negara pionir lain, seperti Kenya dan Malawi.

1.6. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penelitian ini menggarisbawahi tentang perkembangan partisipasi perempuan di berbagai bidang, diantaranya adalah bidang politik. Dalam laporan *Women's Political Leadership in East Africa with Specific Reference to Uganda*, dikatakan bahwa Uganda sudah mengalami kemajuan yang luar biasa mengenai pemberdayaan perempuan sejak 20 tahun terakhir. Sektor yang diteliti dalam penelitian Kadaga adalah jumlah anggota parlemenn perempuan di Uganda (Kadaga, 2013). Menurut Kadaga, salah satu faktor yang paling berperan dalam peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan adalah karena adanya penerapan kuota perempuan. Ada dua sistem penerapan kuota yang dianut oleh negara-negara di Afrika, yang pertama

adalah sistem kursi pesanan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti yang diterapkan di Sudan, Uganda, Tanzania. Sedangkan sistem yang kedua adalah sistem kuota sukarela yang ditetapkan oleh partai, seperti yang digunakan di Botswana, Namibia, dan Afrika Selatan. Di Uganda, UU yang mengatur mengenai kuota perempuan adalah UU Pemerintah Daerah 1997, dan UU Komisi Pemilihan Umum 1997. Selain itu, organisasi non-pemerintah seperti FIDA juga membantu perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, dengan cara membiayai mereka.

Masih berkaitan dengan politik, jurnal berjudul *The Politics of Gender in Uganda: Symbolism in the Service of Pragmatism* membahas mengenai pengaruh perempuan yang menguat dalam pemilihan parlemen (Ottemoeller, 1999). Ottemoeller berpendapat bahwa hal itu terjadi dikarenakan isu gender dijadikan alat politik bagi politisi yang ingin mendapatkan kekuasaan. Jurnal ini juga menyoroti Perang Gerilya oleh National Resistance Movement (NRM) menjadi awal mula perempuan Uganda mulai terlibat dalam dunia politik. Hal itu dikarenakan perempuan banyak yang menjadi pasukan tentara aktif, menyusun strategi gerilya, hingga menyediakan logistik perang. Faktor lain yang berpengaruh adalah meluasnya gerakan feminisme internasional, khususnya adalah adanya penyebaran pengaruh Women in Development (WID). Hal tersebut kemudian memicu semacam kebangkitan politik bagi para perempuan di Uganda.

Sektor lain yang dibahas adalah sektor ekonomi, di mana sebelumnya warga Uganda seringkali dituntut untuk mengurus urusan rumah saja, dan tidak bekerja. Dalam *The Contribution of Women Organizations to the Economic*

Empowerment of Craftswomen: Case Study of The National Association of Women Organizations in Uganda, disebutkan bahwa organisasi Nawou berusaha membantu mengedukasi perempuan dengan mengajarkan ketrampilan untuk membuat kerajinan tangan yang dapat dijual (Liberta, 2012). Mata pencaharian tersebut dipilih karena jam kerjanya fleksibel, dan dapat dikerjakan di rumah masing-masing sehingga tidak menghalangi perempuan untuk tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, pekerjaan ini tidak membutuhkan dasar pendidikan yang tinggi sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan perempuan di Uganda. Usaha ini tidak hanya berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi juga berpengaruh dalam mendorong kepercayaan diri wanita di Uganda, karena mereka dapat berhenti bergantung kepada penghasilan laki-laki.

Ketidakberdayaan perempuan juga dapat berpengaruh pada kesehatan mereka. Pada jurnal berjudul *Marital Rape and HIV Risk in Uganda: The Impact of Women's Empowerment Factors*, ditunjukkan data mengenai wanita Uganda yang menjadi korban kekerasan seksual dan berisiko terkena HIV/AIDS (Mengo, et.al., 2019). Kekerasan seksual yang dibahas dalam jurnal ini berupa tindak pemerkosaan dalam pernikahan. Pemerkosaan memiliki risiko tinggi dalam menyebarkan HIV/AIDS karena penetrasi secara paksa dapat mempermudah masuknya virus ke dalam tubuh korban. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih sedikit mengalami pemerkosaan dalam pernikahan, daripada perempuan yang tidak bersekolah. Perempuan yang tidak mengalami kekerasan seksual juga cenderung memiliki kesempatan yang lebih

tinggi untuk menggunakan kondom ketika berhubungan, sehingga terhindar dari resiko terkena HIV/AIDS. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang tidak berpendidikan cenderung memiliki *power* yang lebih lemah daripada suaminya, sehingga lebih sering dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Selain itu, banyak perempuan yang masih menganggap bahwa yang mereka alami adalah normal, dan bukan merupakan kekerasan seksual.

Beberapa faktor yang sudah disebutkan sebelumnya kemudian dibahas kembali untuk dilihat relasinya dalam jurnal *Moving Out Of Poverty And Women's Empowerment In Uganda* (Emcet, 2010). Jurnal ini membahas mengenai kemungkinan terjadinya mobilitas sosial dengan adanya pemberdayaan perempuan di Uganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan dan lemahnya *power* yang dimiliki perempuan dalam rumah tangga berpengaruh pada rendahnya hingga tidak adanya mobilitas sosial yang terjadi. Sedangkan jika dilakukan beberapa usaha pemberdayaan perempuan, maka dapat terjadi mobilitas sosial yang berarti warga Uganda memiliki kesempatan untuk bangkit dari kemiskinan. Salah satunya adalah dengan pembentukan komunitas khusus perempuan. Komunitas ini dapat membantu perempuan mencapai tujuannya dengan lebih mudah karena berusaha diraih bersama, contohnya komunitas usaha rumah tangga yang berisi sekumpulan perempuan dengan satu tujuan yang sama untuk mendapat penghasilan. Selain itu, usaha rumah tangga yang dikerjakan perempuan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, dan memiliki *power* yang lebih besar dalam rumah tangga agar hak-haknya diakui.

Dari jurnal-jurnal yang telah dijabarkan, seluruhnya telah membahas efek ketidakberdayaan perempuan di berbagai sektor. Beberapa diantaranya juga sudah menjelaskan mengenai berbagai sektor yang mengalami peningkatan sejak dilakukan upaya pemberdayaan perempuan di Uganda. Selain itu, aktor-aktor yang terlibat dalam usaha pemberdayaan perempuan di Uganda juga sudah banyak dielaborasi. Meski demikian, belum ada jurnal yang secara rinci menganalisis mengenai peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan di Uganda.

1.7. Landasan Konseptual

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan konsep organisasi internasional untuk menganalisis peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 hingga 2021. Konsep organisasi internasional merupakan sebuah konsep terhitung baru dalam ilmu hubungan internasional. Hal tersebut dikarenakan pola hubungan internasional di masa lalu masih terbatas pada interaksi antar negara saja. Aktor-aktor yang lebih bervariasi baru muncul setelah masa Perang Dunia I, dikarenakan timbul kesadaran bahwa hubungan baik antar negara perlu dijalin demi menghindari konflik serupa di kemudian hari. Secara garis besar, organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu struktur keanggotaan formal berkesinambungan, yang terbentuk dari perjanjian antar anggota dengan tujuan meraih suatu tujuan bersama (Archer, 2001).

Konsep organisasi internasional kemudian diklasifikasikan oleh Archer diantaranya menurut keanggotaan, peran, serta fungsinya. Hal yang paling mendasar adalah keanggotaan, yang membedakan organisasi internasional

menjadi *Intergovernmental Organization (IGO)* dan *Transnational Organization (TNO)*. IGO meliputi organisasi internasional yang anggotanya merupakan perwakilan dari negara-negara dunia, sedangkan TNO memiliki anggota yang tidak semuanya perwakilan negara, namun ada juga aktor non-negara sebanyak setidaknya satu anggota dari jumlah keseluruhan. Berkaca pada klasifikasi tersebut, UN Women termasuk ke dalam IGO karena berada di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. UN Women tidak memiliki satupun anggota aktor non-negara dan bergerak dalam lingkup antar negara.

Klasifikasi organisasi internasional juga dapat dilihat dari peran mereka dalam sistem politik dunia. Pengelompokan peran organisasi internasional tersebut dapat dilakukan berdasarkan sistem yang dijalankan di dalam organisasi tersebut (Archer, 2001). Unsur-unsur yang digunakan sebagai pembanding misalnya dapat berupa tujuan organisasi, tugas dan kewenangan, hingga jenis kegiatan yang dilakukan. Tiga peran utama organisasi internasional yang diklasifikasikan oleh Archer adalah sebagai berikut (Archer, 2001):

a. Organisasi internasional sebagai instrumen

Peran sebagai instrumen yang dimaksud dalam poin ini dapat diartikan sebagai bagaimana sebuah organisasi internasional dijadikan alat bagi negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya (Archer, 2001). Peran ini akan lebih mudah dipenuhi oleh IGO karena seluruh anggotanya terdiri dari negara yang berdaulat, sehingga memiliki kekuatan untuk menekan keputusan organisasi (Archer, 2001).

b. Organisasi internasional sebagai arena

Peran organisasi internasional selanjutnya adalah sebagai arena atau tempat suatu kegiatan dilaksanakan (Archer, 2001). Dapat diartikan juga bahwa organisasi internasional tersebut menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berkumpul dan berdiskusi (Archer, 2001). Sejalan dengan peran sebagai instrumen, organisasi internasional sebagai arena memenuhi perannya karena diundang dan dibutuhkan oleh negara, bukan menentukan keputusannya sendiri.

c. Organisasi internasional sebagai aktor independen

Kata kunci peran yang terakhir adalah independen, di mana organisasi dapat membuat keputusan atau melakukan tindakan di dunia internasional tanpa secara signifikan terpengaruh oleh kekuatan dari luar organisasi (Archer, 2001). Pernyataan ini mungkin banyak menimbulkan kontra karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan anggota sangat penting bagi organisasi internasional. Meski demikian, sebagian organisasi internasional tetap memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan beberapa anggota, serta dapat mempengaruhi tindakan anggota lain (Archer, 2001).

Berdasarkan klasifikasi yang dijabarkan oleh Archer, UN Women memenuhi tiga peran dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda, yaitu UN Women sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Uganda merupakan negara yang cukup sadar akan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, namun tidak memiliki cukup sumber daya untuk mencapainya. Oleh karena itu, Uganda kemudian mengundang UN Women

untuk masuk dan membantu mereka memenuhi kepentingan nasionalnya yang berkaitan dengan masalah gender.

Bantuan yang dilakukan oleh UN Women tersebut adalah dengan menjadi instrumen untuk menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian, serta melakukan pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi SDGs. Selain itu, UN Women juga menyediakan arena bagi Uganda untuk melakukan pertemuan atau diskusi dengan negara-negara anggota lainnya, dalam rangka bertukar informasi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Uganda. UN Women juga memenuhi peran sebagai aktor independen karena memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan anggotanya.

Selanjutnya, Archer mendefinisikan fungsi dari organisasi internasional. Untuk dapat berfungsi, suatu sistem membutuhkan sumber daya untuk mengubah *input* menjadi *output* (Archer, 2001). Peran organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor independen yang telah dibahas sebelumnya berpengaruh terhadap fungsi organisasi tersebut. Terdapat sembilan fungsi organisasi internasional menurut Archer, yaitu (Archer, 2001):

- a. Artikulasi dan agregasi kepentingan, organisasi internasional menjalankan fungsi tersebut dengan menjadi instrumen untuk artikulasi dan agregasi bagi anggotanya (Archer, 2001).
- b. Norma, organisasi internasional memiliki kemampuan untuk menciptakan norma yang berlaku di dunia internasional (Archer, 2001). Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi internasional tersebut dapat berkembang

membentuk norma dan aturan, meskipun kekuatannya cenderung lemah dan tidak mengikat.

- c. Rekrutmen, organisasi internasional dapat melakukan fungsi perekrutan anggota baru dalam sistem politik internasional (Archer, 2001). Hal tersebut tergantung pada seberapa berpengaruh suatu organisasi internasional dalam menarik anggota untuk turut bergabung ke dalam organisasi tersebut.
- d. Sosialisasi, fungsi tersebut berkaitan dengan bagaimana organisasi internasional melakukan sosialisasi untuk mendapatkan penerimaan oleh masyarakat atas nilai atau norma yang mereka anut (Archer, 2001).
- e. Pembuatan kebijakan, organisasi internasional dapat berfungsi sebagai pembuat kebijakan, karena tidak ada pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan formal di dalam sistem politik internasional (Archer, 2001).
- f. Penerapan kebijakan, organisasi internasional berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dapat dipatuhi dengan baik oleh negara-negara anggotanya (Archer, 2001)
- g. Pengesahan kebijakan, sama seperti fungsi sebagai pembuatan kebijakan, organisasi internasional dapat melakukan pengesahan atas kebijakan yang telah dibuat, dikarenakan tidak ada lembaga hukum pusat di sistem politik internasional (Archer, 2001).
- h. Informasi, fungsi ini memang tidak secara langsung terlibat dalam sistem organisasi, namun tak kalah penting. Organisasi internasional berfungsi sebagai penyedia informasi dengan menerbitkan publikasi dengan tema

tertentu. Informasi ini biasanya disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh umum sehingga banyak diminati oleh masyarakat (Archer, 2001).

- i. Operasional, fungsi operasional dari organisasi internasional dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan yang mereka lakukan. Jenis kegiatan tersebut tergantung pada tujuan dan bidang yang digeluti oleh organisasi tersebut (Archer, 2001). Pada organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan misalnya, maka dapat mengadakan operasi, proyek, atau program bantuan kemanusiaan.

Berdasarkan fungsi organisasi internasional yang diklasifikasikan oleh Archer, UN Women memenuhi enam fungsi dalam memajukan kesejahteraan perempuan di Uganda, yaitu artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan dan penerapan kebijakan, informasi, dan operasional. UN Women tidak memenuhi fungsi dalam pengesahan kebijakan karena tidak memiliki lembaga hukum dalam struktur organisasinya. sehingga tidak memenuhi fungsi pengesahan kebijakan dari organisasi internasional.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, maka dapat dilihat bagaimana posisi UN Women sebagai suatu organisasi internasional. Fokus UN Women pada pemberdayaan perempuan dan upaya yang mereka lakukan tentunya banyak berperan terhadap perkembangan kesejahteraan perempuan di Uganda. Meski demikian, UN Women tidak bergerak sendiri karena ada peran pemerintah Uganda juga di sana. Konsep organisasi internasional dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat bagaimana peran dan fungsi UN Women dalam pemberdayaan perempuan di Uganda.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka. Sumber yang digunakan merupakan sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan resmi, website resmi, dan berita yang terpercaya. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah dengan menentukan rumusan masalah yang hendak diteliti. Peneliti juga terlebih dahulu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya, atau setidaknya memiliki unsur pembeda dengan penelitian yang sudah ada. Setelah itu barulah peneliti menggunakan sumber yang telah didapatkan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti adalah peran dan fungsi organisasi internasional yaitu UN Women. Sedangkan objek yang hendak diteliti adalah pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 hingga 2021.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Penulis mencari data berupa tulisan, gambar, hingga tabel, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Data juga harus berasal dari sumber sekunder yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu buku, jurnal, berita, hingga web resmi di internet. Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah buku, jurnal,

berita, dan laporan resmi tentang berbagai usaha yang dilakukan oleh UN Women untuk memberdayakan perempuan Uganda, buku tentang konsep organisasi internasional, serta laporan aktor non-pemerintah selain UN Women tentang usaha pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan di Uganda.

1.8.4. Proses Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari buku, jurnal, laporan, berita, hingga laman web resmi yang membahas tentang UN Women dan berbagai aktor non-pemerintah lain yang berperan dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda. Setelah itu peneliti melakukan studi pustaka agar dapat menganalisis masalah yang sebelumnya telah ditentukan. Dari studi pustaka yang telah dilakukan barulah peneliti dapat menyimpulkan bagaimana sebenarnya peran dan fungsi UN Women dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan di Uganda sejak tahun 2014 hingga 2021.

BAB II

PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UGANDA

Organisasi internasional memiliki peran masing-masing yang mereka mainkan di politik global. Klasifikasi peran yang dilakukan oleh organisasi internasional dapat dilihat dari sistem yang berlaku dalam organisasi tersebut (Archer, 2001). Sistem yang dimaksud melibatkan internal organisasi yaitu tujuan, tugas, hingga kegiatan yang dilakukan. Archer mengelompokkan peran organisasi internasional menjadi tiga bagian yaitu organisasi internasional sebagai instrumen, arena dan aktor independen (Archer, 2001). Dalam bab ini, sebelum membahas mengenai peran UN Women, sebelumnya akan dijabarkan bagaimana kondisi pemberdayaan perempuan di Uganda. Setelah itu, akan dibahas mengenai profil dan peran apa saja yang dijalankan oleh UN Women. Akan dijabarkan bagaimana UN Women dimanfaatkan Uganda sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, bagaimana Uganda menggunakan UN Women sebagai arena atau forum untuk diplomasi, serta bagaimana UN Women berperan sebagai aktor independen di Uganda.

2.1. Pemberdayaan Perempuan di Uganda

Uganda merupakan negara yang cukup lama berada dalam teror, perang sipil, dan brutalisasi dikarenakan ketidakstabilan keadaan politiknya. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, bunuh diri, anak-anak terlantar, peningkatan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan, hingga kesenjangan gender yang amat besar di kalangan masyarakat pedesaan (Boyd, 1989). Kondisi ini berlangsung cukup lama dikarenakan Uganda masih memprioritaskan kestabilan ekonomi dan

politiknya, dibanding permasalahan gender yang dianggap minor. Meski demikian, keadaan berubah ketika Uganda mulai menyadari pentingnya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan sektor-sektor lainnya, misalnya ekonomi.

Menurut definisi UN Women, perempuan dapat dikatakan berdaya jika memenuhi beberapa standar, di antaranya sebagai berikut (UN Women, 2021):

- Perempuan dapat memimpin, berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan yang sama dari sistem pemerintahan (UN Women, 2021),
- Perempuan memiliki jaminan pendapatan, pekerjaan layak dan otonomi ekonomi (UN Women, 2021),
- Semua perempuan dan anak perempuan menjalani kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan (UN Women, 2021),

Standar tersebut kemudian digunakan untuk mengukur bagaimana kondisi pemberdayaan perempuan di suatu negara. Uganda merupakan salah satu negara pionir yang menyadari adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan permasalahan gender di Afrika sub-Sahara Afrika (Ellis et.al, 2006). Meski bukan satu-satunya, namun yang menjadikan Uganda penting untuk diteliti adalah karena kemajuan mereka yang pesat di sektor-sektor yang berkaitan dengan perempuan jika dibandingkan dengan negara pionir lainnya, misalnya Kenya dan Malawi. Indikator yang digunakan sebagai pembanding adalah jumlah perempuan yang mendapat kursi dalam parlemen, jumlah pekerja perempuan di bidang pertanian, serta peringkat dalam indeks kesenjangan gender global.

Jumlah perempuan yang mendapatkan kursi dalam parlemen per tahun 2000 hingga 2010 di Uganda mengalami kenaikan dari 18% menjadi 31% (International IDEA, 2021). Jumlah tersebut terhitung tinggi jika dibandingkan dengan Kenya yang hanya mengalami peningkatan dari 4% menjadi 10%, dan Malawi dari 9% menjadi 21% (International IDEA, 2021). Uganda juga menunjukkan kenaikan signifikan pada jumlah perempuan yang mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian, yaitu 71,17% pada tahun 2012, hingga menjadi 77,43% pada tahun 2014 (World Bank, 2021). Jumlah yang jauh berbeda ditunjukkan oleh Kenya yang mengalami penurunan dari 65,36% di tahun 2012, menjadi 63,78% pada tahun 2014 (World Bank, 2021). Meski Malawi memiliki persentase yang cukup tinggi, tetapi jumlahnya juga mengalami penurunan dari 84,26% di tahun 2012, menjadi 83,5% pada tahun 2014 (World Bank, 2021).

Uganda juga sempat menduduki peringkat ke-28 pada indeks kesenjangan gender global di tahun 2012 (World Economic Forum, 2012). Pada tahun yang sama, Malawi berada di peringkat ke-36, sedangkan Kenya berada cukup rendah pada peringkat ke-72 (World Economic Forum, 2012). Seluruh kemajuan yang dialami oleh Uganda tersebut terjadi ketika UN Women belum diundang oleh pemerintah Uganda untuk membantu meningkatkan pemberdayaan perempuannya. Antusiasme Uganda dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan sejak sebelum UN Women masuk tersebut dapat dilihat dari data yang telah disajikan. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian hendak mengeksplor lebih jauh mengenai bagaimana

perkembangan pemberdayaan perempuan di Uganda setelah UN Women masuk dan melakukan peran serta fungsinya.

2.2. Profil UN Women

UN Women atau United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, merupakan organisasi internasional yang bergerak di bawah komando PBB untuk menangani permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women baru secara resmi terbentuk pada tahun 2010, sebagai ‘naungan’ dari empat cabang khusus PBB yang menangani hal serupa, yaitu Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI); International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW); Division for the Advancement of Women (DAW); and United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) (UN Women, 2016). Kemunculan UN Women menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat mengenai permasalahan gender. UN Women menjadi pendamping PBB untuk memastikan bahwa setiap anggotanya mencapai standar yang sama dalam kesetaraan gender dan perempuan yang berdaya. UN Women kemudian bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa standar tersebut tercapai.

UN Women memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia, salah satunya adalah di Uganda. Sama seperti kebanyakan negara di Afrika, Uganda mengalami konflik bersenjata dan pergolakan politik yang serius untuk waktu yang lama. Keadaan memang sudah membaik sejak 2006 ketika keadaan politik di Uganda mulai stabil. Pemerintah juga mulai sadar akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi perempuan, yang akan

berpengaruh pada meningkatnya masyarakat perempuan yang berdaya. Oleh karena itu, Pemerintah Uganda kemudian menjalin kerja sama dengan UN Women sebagai organisasi yang bergerak di bidang tersebut, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di negaranya.

2.3.UN Women Sebagai Instrumen

Peran sebuah organisasi internasional yang paling umum menurut Archer adalah sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh anggotanya untuk kepentingan masing-masing. Peran ini biasanya lebih efektif dilakukan oleh *Intergovernmental Organizations* (IGO) karena anggotanya merupakan negara-negara yang berdaulat sehingga memiliki kekuatan untuk membatasi keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional (Archer, 2001). Pada umumnya IGO adalah instrumen untuk kebijakan individu pemerintah, sebagai sarana diplomasi negara anggota yang berbeda-beda dan berdaulat (Myrdal, 1955). Singkatnya, organisasi internasional dapat dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing anggotanya.

Negara-negara maju sering dilihat sebagai anggota yang dominan karena memiliki *power* yang tidak dimiliki oleh negara berkembang. Meski demikian, sebuah organisasi internasional tidak boleh menjadi instrumen politik bagi negara anggota tertentu saja. Setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi tersebut juga tidak harus mutlak mewakili kepentingan nasional semua anggota (Archer, 2001). Bagaimana suatu organisasi internasional digunakan negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dapat dilihat dari cara pengambilan keputusan yang berlaku. Konstitusi yang berlaku di kebanyakan organisasi internasional tidak memungkinkan suatu proses

pengambilan suara yang dapat mengikat anggota yang menentang keputusan yang diambil (Archer, 2001). Dengan kata lain, negara tidak dapat dipaksa untuk mematuhi keputusan yang telah diambil, jika sebelumnya mereka memberikan suara yang menentang keputusan tersebut.

Uganda menjadi pionir bagi negara-negara Afrika sub-Sahara yang menyadari adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan permasalahan gender (Ellis et.al., 2006). Meski memang kondisi perempuan di Uganda belum dapat dikatakan telah sepenuhnya sejahtera. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek, salah satu contohnya adalah perempuan harus mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk mendapat pekerjaan dan menghidupi dirinya. Kemiskinan menghantui sebagian besar keluarga di Uganda yang hanya memiliki perempuan sebagai penopang ekonomi utama. Selain tidak memiliki dasar pendidikan yang cukup untuk bekerja, banyak perempuan tidak diberikan kesempatan kerja yang layak dan setara dengan laki-laki. Perempuan seringkali dianggap tidak memiliki produktivitas kerja yang baik karena harus memenuhi peran biologis mereka untuk mengandung dan melahirkan.

Pekerja perempuan di Uganda sebagian besar hanya bekerja di lahan pertanian milik keluarga tanpa dibayar, atau bekerja sendiri di sektor informal. Perempuan meliputi 80% dari seluruh pekerja Uganda yang tidak dibayar (Ellis et.al., 2006). Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Uganda sudah sangat menyadari pentingnya pemberdayaan perempuan, namun terkendala oleh berbagai faktor. Uganda membutuhkan partner untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan program-program

yang berkaitan dengan permasalahan gender. Oleh karena itu, pemerintah Uganda kemudian menggandeng UN Women untuk bekerja sama dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan.

Selain masalah ekonomi dan gender, Uganda juga menjadi salah satu dari negara Afrika yang paling awal mengembangkan rencana pembangunan nasional yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang pernah dijalankan sejak tahun 2000 hingga 2015. Seperti yang telah diketahui, poin kelima dalam SDGs adalah untuk “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (UN Women, 2017). Pemerintah Uganda meyakini bahwa pemberdayaan perempuan memiliki keterkaitan yang erat dengan seluruh poin dalam SDGs. Pemberdayaan perempuan perlu diperhatikan karena perempuan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Meskipun Uganda dan UN Women fokus pada implementasi poin kelima dalam SDG, namun seluruh poin yang ada turut berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Dalam menjalankan perannya sebagai instrumen, Uganda bekerja sama dengan UN Women untuk menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian. Bidang tersebut dipilih dikarenakan mayoritas pekerja perempuan di Uganda bekerja di sektor pertanian. Selain itu, Uganda juga menggandeng UN Women dalam lokalisasi dan implementasi SDGs di Uganda. Lokalisasi dan implementasi SDGs dianggap

penting karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Uganda.

2.3.1. Penyusunan Strategi Guna Mengatasi Kesenjangan Gender di Bidang Pertanian

Kesejahteraan perempuan sebelumnya tidak dilihat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian negara, terutama di negara-negara berkembang. Setelah Uganda menyadari bahwa permasalahan gender memiliki keterkaitan erat terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah mulai menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang bergerak di pemberdayaan perempuan, salah satunya adalah UN Women. UN Women berupaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan terlebih dahulu mencari tahu penyebab dari ketidakberdayaan perempuan di Uganda di bidang ekonomi. Pemberdayaan yang ingin ditingkatkan oleh Uganda meliputi kesetaraan akses perempuan terhadap pekerjaan, sehingga perempuan dapat menghidupi dirinya sendiri.

Salah satu temuan penting oleh UN Women adalah adanya kesenjangan gender di bidang produktivitas pertanian. Bidang pertanian dijadikan fokus penelitian dikarenakan sektor ini merupakan mesin penggerak utama bagi perekonomian Uganda, sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar serta untuk memastikan adanya keamanan pangan dan tercukupinya kebutuhan gizi bagi penduduk setempat (UN Women, et.al, 2015). Bersama dengan sektor kehutanan dan perikanan,

sektor pertanian menyumbang hampir seperempat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Uganda (Akhrum-Lodhi, 2018).

Pada tahun 2014, sektor ini menyumbang sekitar 23% dari total PDB, dan mencapai 57,2% dari total ekspor Uganda (EOC & UN Women, 2017). Angka ini tidak lepas dari fakta bahwa hampir tiga perempat penduduk yang sudah memasuki usia kerja, bertempat tinggal di daerah pedesaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67% pekerja laki-laki dan 77% pekerja perempuan bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. (UBOS, 2014). Meski jumlah pekerja perempuan di sektor pertanian mendominasi, namun mereka hanya memperoleh kontrol sebanyak 20% saja atas hasil pertanian (EOC & UN Women, 2017).

Hambatan muncul karena perempuan tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap tanah, tenaga kerja, mesin pendukung, hingga layanan penyuluhan. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap produktivitas pertanian oleh pekerja perempuan. Tanah yang dikelola oleh perempuan menghasilkan rata-rata 17% lebih sedikit hasil panen per hektarnya, dibanding dengan tanah yang dikelola laki-laki atau bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya (EOC & UN Women, 2017). Hasil penelitian dari UN Women menunjukkan bahwa mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian dapat berpengaruh terhadap peningkatan PDB sektor pertanian, serta juga berpengaruh pada peningkatan perekonomian Uganda secara keseluruhan. Rincian perkiraan peningkatan PDB di Uganda dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women tentu saja merupakan aktor yang tepat untuk membantu pemerintah Uganda mencapai tujuannya. Untuk itu, UN Women selaku instrumen berupaya untuk membantu pemerintah menyusun aturan dan kebijakan yang dapat menciptakan adanya kesetaraan gender pada bidang pertanian. Langkah yang kemudian diambil UN Women untuk meneliti dan menyusun strategi yang tepat adalah dengan meresmikan Gender and Equity Compact for the Agriculture Sector (GECAS) untuk periode 2016/2017 – 2019/2020.

Tabel 1: Kesenjangan Gender pada Produktivitas Pertanian dan Keuntungan dari Kesetaraan Gender di Bidang Pertanian

Negara	Kesenjangan produktivitas pertanian	Kenaikan hasil panen	Kenaikan PDB pertanian	Kenaikan jumlah total PDB
Malawi	28%	7,3%	\$90 juta (per tahun)	\$100 juta
Tanzania	16%	2,1%	\$85 juta (per tahun)	\$105 juta
Uganda	13%	2,8%	\$58 juta	\$67 juta
Ethiopia	12%	1,39%	\$229 juta (satu kali)	\$256,6 juta
Rwanda	11,7%	NA.	\$418,6 juta (satu kali)	NA.

Sumber: Diadaptasi dari UN Women, UNDP, UNEP, World Bank Group. (2015). *The Cost of the Gender Gap in Agricultural Productivity in Malawi, Tanzania, Uganda*. UN Women.

Kerja sama antara pemerintah Uganda dan UN Women melalui GECAS untuk memenuhi perannya sebagai instrumen, melahirkan beberapa strategi untuk mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian, yaitu antara lain:

- Mempromosikan inovasi gender dalam penelitian serta penyuluhan di sektor pertanian (EOC & UN Women, 2017). Hasil dari penelitian dan penyuluhan dapat membantu mengedukasi pekerja wanita yang tidak mendapatkan akses pendidikan seperti laki-laki, sehingga mereka tetap berdaya. Masyarakat juga harus diedukasi mengenai pentingnya kesetaraan gender di bidang pertanian, misalnya dengan menghilangkan budaya menjadikan perempuan hanya sebagai pekerja yang tidak dibayar untuk mengurus lahan keluarga.
- Menyediakan teknologi dan inovasi pertanian yang dapat membantu masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan pekerja perempuan (EOC & UN Women, 2017). Pekerja perempuan, khususnya, dapat terbantu dengan teknologi hemat kerja yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka, sehingga tidak lagi tertinggal dengan hasil produk panen laki-laki.
- Memberikan akses yang sama ke mesin dan peralatan pertanian yang dibutuhkan melalui sistem peminjaman yang menguntungkan bagi masyarakat miskin, pemuda, manula, penyandang disabilitas, dan asosiasi tenaga kerja perempuan (EOC & UN Women, 2017). Poin ini merupakan lanjutan dari poin kedua di mana setelah muncul teknologi, maka akses menuju mesin tersebut harus terbuka untuk

semua pihak. Sistem peminjaman terhadap mesin dan peralatan pertanian tersebut juga perlu diperhatikan, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh pekerja pertanian yang membutuhkan.

Dari penjelasan yang telah diberikan, maka dapat dilihat bagaimana UN Women dimanfaatkan oleh Uganda untuk menyusun strategi guna mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian. Uganda sebagai organisasi internasional yang profesional dapat memberikan data-data dan informasi penting yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut. UN Women dan Uganda juga berhasil membentuk GECAS yang kemudian melahirkan beberapa strategi guna mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian.

2.3.2. Pendampingan terhadap Lokalisasi dan Implementasi SDGs

Lokalisasi SDGs yang dilakukan oleh pemerintah Uganda adalah merancang atau menyesuaikan strategi pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah nasional dengan indikator-indikator dan prioritas SDGs yang telah ditetapkan (UN Women, 2017). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti diskusi mengenai implementasi *2030 Agenda for Sustainable Development* antar negara anggota. Dari diskusi tersebut maka akan didapatkan keputusan mengenai bagaimana seharusnya strategi pembangunan nasional diterapkan untuk dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, perlu diadakan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai isi dari *2030 Agenda for Sustainable Development*.

Bagian ini mungkin akan membutuhkan usaha lebih karena isi dari tujuan pembangunan berkelanjutan harus diartikan ke bahasa setempat agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Di Uganda sendiri ada lebih dari 56 suku dan setidaknya sembilan komunitas adat sehingga akan lebih sulit untuk mengartikan isi SDGs ke seluruh bahasa yang ada (UN Women, 2017). Untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, pemerintah Uganda menyadari bahwa penting untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya UN Women. UN Women sebagai sebuah organisasi internasional yang memang fokus di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dapat memberi dukungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mencapai poin kelima dalam SDGs tersebut.

Pada dasarnya, hambatan terbesar pemerintah Uganda dalam mencapai SDGs meliputi tiga hal yaitu data, kapasitas, serta sumber daya. Data sulit untuk didapatkan salah satunya dikarenakan perbedaan yang ada di level nasional dan global terkait konsep, definisi, metodologi, hingga sumber data (UN Women, 2017). Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas teknis di mana Uganda masih belum memiliki kapasitas yang memadai dalam memfasilitasi manajemen data, menggelontorkan dana, serta menyediakan bantuan tenaga profesional. Hambatan yang terakhir yaitu sumber daya, masih berkaitan dengan mekanisme pembiayaan domestik dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan yang cukup menyulitkan Uganda (UN Women, 2017).

Dalam mendukung upaya Uganda untuk merancang implementasi SDGs-nya, UN Women berusaha menyediakan informasi dan data-data yang diperlukan. Sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perempuan, UN Women memiliki kemampuan serta sumber daya yang memadai untuk mengumpulkan data. UN Women juga dapat membantu mengatasi hambatan yang dialami oleh pemerintah terkait perbedaan indikator pengumpulan data di level domestik dan internasional.

Selain itu, UN Women terus berupaya mengelola manajemen pengetahuan dan penelitian yang dinamis dan interaktif untuk berbagi informasi, analisis, praktik yang baik, hingga tantangan yang muncul tentang lokalisasi dan implementasi SDGs (UN Women, 2017). Untuk hambatan mengenai kapasitas dan sumber daya diatasi oleh UN Women dengan cara mendirikan kantor di Uganda (UN Women, 2017). Keberadaan kantor kemitraan tersebut dapat membantu dalam menyediakan tenaga profesional yang diperlukan untuk lokalisasi dan implementasi SDGs di Uganda.

UN Women berhasil memenuhi perannya sebagai instrumen sebagai partner Uganda dalam mengarahkan hingga 76% target SDGs ke dalam *National Development Plan* (NDP II) (UN Women, 2017). NDP II menekankan beberapa poin penting berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, yaitu antara lain:

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh perempuan dan anak perempuan di Uganda (UN Women, 2017).

- Memastikan adanya kesempatan yang sama untuk memimpin serta partisipasi penuh perempuan di berbagai tingkat pengambilan keputusan dalam sektor politik, ekonomi hingga publik (UN Women, 2017).
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
- Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan atas sumber daya ekonomi serta perihal kepemilikan dan kendali atas properti dalam bentuk apapun, warisan, hingga sumber daya alam sesuai dengan sumber hukum nasional (UN Women, 2017).
- Pengarusutamaan gender dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah (UN Women, 2017).

Bersama Inter-Agency and Expert Group (IAEG) dan pemerintah Uganda, UN Women mengembangkan 106 National Priority Gender Indicators (NPGEIs) dalam proses partisipatif (UN Women, 2017). Daftar tersebut terbagi ke dalam enam sektor yang dapat dilihat pada tabel 2. Indikator tersebut digunakan untuk mengawasi kemajuan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan dalam NDP II.

Tabel 2: Enam Sektor yang Termasuk di Dalam NPGEIs

Ekonomi	24
Pendidikan	28
Kesehatan	35
Partisipasi Politik dan Kepemimpinan	5
Hak Asasi Manusia	6
ICT	5

Sumber: Diadaptasi dari UN Women. (2017). *Accelerating the Implementation of Agenda 2030 on Sustainable Development: Approaches by African Countries in the Localization and Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). Africa: UN Women.*

Dari data yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa peran UN Women dalam melakukan lokalisasi dan implementasi SDGs di Uganda adalah dengan membantu mengatasi hambatan yang meliputi data, kapasitas, serta sumber daya. UN Women menyediakan data-data yang diperlukan oleh Uganda mengenai pengarusutamaan SDGs, serta mendirikan kantor kemitraa di Uganda untuk membantu menyediakan tenaga profesional. Hasilnya, sebanyak 76% dari target SDGs berhasil masuk ke dalam NDP II, dan banyak menekankan mengenai poin-poin penting yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan penjabaran peran pada sub-bab 2.3.1 dan 2.3.2, maka dapat dilihat bagaimana UN Women memenuhi perannya sebagai instrumen di Uganda. Sesuai dengan definisi Archer bahwa organisasi internasional dimanfaatkan oleh negara sebagai alat atau instrumen untuk mencapai

kepentingannya, UN Women menjadi alat Uganda untuk membantu dalam penyusunan strategi guna mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian. Usaha ini kemudian berhasil melahirkan beberapa strategi di bawah GECAS. UN Women juga digunakan Uganda sebagai instrumen untuk melakukan pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi SDGs. Hasilnya, ada sebanyak 76% target SDGs yang masuk ke dalam NDP II. Oleh karena itu, UN Women berhasil memenuhi perannya sebagai instrumen sesuai definisi Archer.

2.4. UN Women Sebagai Arena

Peran organisasi internasional selanjutnya menurut Archer adalah sebagai arena atau forum tempat suatu tindakan terjadi (Archer, 2001). Dengan kata lain, organisasi internasional berperan untuk menyediakan tempat pertemuan dan mempertemukan anggota agar dapat berdebat, berdiskusi, hingga bekerja sama. Peran sebagai arena bagi IGO yang seluruh anggotanya terdiri dari negara-negara, mungkin akan disamakan seperti diplomasi bilateral. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah organisasi internasional sebagai arena berarti ia lebih bersifat netral dan tidak memihak anggota manapun. Organisasi internasional memenuhi perannya dengan memberikan anggotanya kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan saran dari perspektif masing-masing dalam suatu arena atau forum yang lebih terbuka dibanding dengan diplomasi bilateral (Archer, 2001). Prinsip netral dan terbuka tersebut juga berarti bahwa seluruh proses komunikasi yang dilakukan di dalam forum harus melibatkan sebanyak mungkin anggota, dan

segala detail aturan maupun informasi mengenai forum harus disampaikan secara terbuka (Archer, 2001).

UN Women memenuhi perannya sebagai arena untuk mempertemukan anggotanya untuk mengemukakan pandangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Uganda memanfaatkan peran UN Women untuk bertemu dengan negara-negara lain demi membantu melancarkan program negaranya. Salah satu pertemuan tersebut membahas tentang *“Financing for Gender Equality - Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa”* yang diselenggarakan pada 15 Juli 2015 di Addis Ababa, Ethiopia (UN Women, 2015). Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk berbagi contoh penerapan kebijakan, undang-undang, program, alokasi sumber daya, hingga dana yang dibutuhkan untuk pemberdayaan perempuan (UN Women, 2015).

Karena melibatkan seluruh anggota mulai dari negara maju hingga negara berkembang, maka forum tersebut sangat bermanfaat untuk berbagi informasi, pandangan, serta saran dari berbagai pihak. Negara maju dapat belajar dari masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, dan negara berkembang dapat menerapkan saran dari negara maju yang memiliki akses dan sumber daya yang lebih memadai. Uganda yang terbilang masih baru dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan dapat belajar dari negara-negara yang lebih berpengalaman.

Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah untuk berdiskusi mengenai pembiayaan transformatif untuk pemberdayaan perempuan, serta menyatukan pemerintah, anggota UN Women, dan masyarakat sipil untuk

membahas mengenai cara pendanaan terkait dengan masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2015). Dari diskusi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi dan lokalisasi SDGs yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pemenuhan strategi pembangunan berkelanjutan bergantung pada potensi rakyat, terutama wanita dan anak perempuan (UN Women, 2015). Pertemuan ini tentu sangat bermanfaat bagi Uganda yang sedang fokus untuk menerapkan implementasi dan lokalisasi SDGs bagi negaranya. Sehingga Uganda berhasil memanfaatkan peran UN Women sebagai arena.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah didapatkannya informasi mengenai perspektif global serta pembiayaan yang diperlukan dalam implementasi dan lokalisasi SDGs, yang kemudian dapat diterapkan oleh Uganda. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mendukung komitmen Uganda untuk melakukan pengarusutamaan target SDGs ke dalam *National Development Plan II (NDP II)* (UN Women, 2017). Beberapa langkah yang dilakukan oleh Uganda untuk menjamin komitmennya adalah sebagai berikut (UN Women, 2017):

- Merancang alat dan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dana yang dibutuhkan dalam penerapan SDGs.
- Merancang pedoman mengenai implementasi, pemantauan, hingga pelaporan yang tepat untuk antisipasi setelah penerapan SDGs.
- Merancang indikator yang tepat untuk mengukur keterpaduan, misalnya seperti PDB per kapita.

Dari hasil yang didapatkan maka jelas terlihat bagaimana UN Women memenuhi perannya sebagai arena di Uganda. Sesuai dengan definisi yang telah dijabarkan oleh Archer yaitu organisasi internasional berperan untuk menyediakan tempat pertemuan dan mempertemukan anggota agar dapat berdebat, berdiskusi, hingga bekerja sama. UN Women memenuhi perannya dengan menyediakan forum bagi Uganda untuk berdiskusi mengenai lokalisasi SDGs dan pembiayaan yang diperlukan, sehingga Uganda dapat melakukan pengarusutamaan target SDGs ke dalam NDP II secara maksimal.

2.5. UN Women Sebagai Aktor Independen

Peran lain dari organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai aktor independen. Peran ini dipenuhi ketika organisasi dapat membuat keputusan atau melakukan tindakan di dunia internasional tanpa secara signifikan terpengaruh oleh kekuatan dari luar organisasi (Archer, 2001). Bagi IGO yang memiliki negara-negara sebagai anggota, peran aktor independen seringkali dipertanyakan karena bagaimana mungkin sebuah organisasi internasional memiliki kekuatan yang melebihi negara berdaulat. Yang perlu diingat adalah jika suatu IGO tersebut memiliki sistem, tatanan dan birokrasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada penerimaan setiap tindakan oleh semua anggotanya, maka akan sulit bagi anggota untuk menghentikan aktivitas dari IGO tersebut (Archer, 2001). Selain itu, sebagian besar organisasi tetap memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan maupun tindakan yang bertentangan dengan keinginan beberapa anggota, serta dapat mempengaruhi tindakan anggota lain (Archer, 2001).

Peran UN Women sebagai aktor independen di Uganda cukup signifikan karena dapat memengaruhi tindakan pemerintah Uganda. Sebagai negara berkembang yang belum fokus secara penuh terhadap kesejahteraan perempuan, Uganda masih memiliki banyak 'pekerjaan rumah' yang tertunda. Untuk itu UN Women menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan kesetaraan gender di Uganda. Rancangan undang-undang, kebijakan, hingga anggaran nasional yang berkomitmen terhadap kesejahteraan perempuan merupakan komitmen pemerintah menuju kesetaraan gender (UN Women, 2020). Sehingga, UN Women bergerak dengan cara mendesak parlemen untuk meresmikan rancangan undang-undang dan kebijakan yang ramah perempuan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UN Women adalah memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang terdampak perang dengan The Lord's Resistance Army (LRA) di daerah Uganda bagian utara. LRA merupakan gerakan pemberontak anti pemerintah yang juga menyerang masyarakat sipil apabila dianggap mendukung pemerintah. Tercatat hingga 10.000 korban tewas akibat pembantaian LRA, dan lebih dari 20.000 anak-anak diculik untuk dijadikan tentara, kuli angkut, hingga budak seks (Rice, 2007). Konflik belasan tahun silam itu mungkin telah berakhir, tetapi meninggalkan dampak yang membekas bagi korban yang selamat. Banyak perempuan yang menjadi penyandang disabilitas usai perang, dan menjadi sasaran kejahatan di kamp pengungsian. Para korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan membela dirinya sendiri.

UN Women kemudian mendesak Parlemen Uganda untuk mengeluarkan resolusi untuk menyerukan pembentukan program khusus untuk korban yang terdampak perang LRA di Uganda bagian utara (UN Women, 2014). UN Women mengadakan pertemuan yang mempertemukan perwakilan pemerintah, PBB, donor, kelompok perempuan dan korban, hingga masyarakat sipil (UN Women, 2014). Resolusi tersebut kemudian dikabulkan pada 9 April 2014 setelah perjuangan yang cukup lama. Melalui resolusi yang bersangkutan, parlemen mendesak pemerintah Uganda untuk memberikan bantuan dana dan segala jenis dukungan yang dapat membantu korban untuk pulih. Pemerintah diminta untuk memperhatikan pemulihan dan rehabilitasi korban perang LRA, serta meningkatkan pembangunan dan investasi ke masyarakat korban perang LRA (UN Women, 2014). Keberhasilan tersebut menunjukkan bagaimana UN Women dapat memenuhi perannya sebagai aktor independen. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Archer, bahwa organisasi internasional dapat mempengaruhi tindakan anggotanya. Dalam hal ini, UN Women berhasil mempengaruhi Uganda untuk mengambil tindakan yaitu mengeluarkan resolusi untuk membentuk program bantuan khusus bagi korban yang terdampak perang dengan LRA.

BAB III

FUNGSI UNITED NATIONS WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UGANDA

Klasifikasi selanjutnya mengenai organisasi internasional menurut Archer adalah apa saja fungsi yang dijalankan di sistem politik global. Untuk dapat berfungsi, suatu sistem membutuhkan sumber daya untuk dapat mengubah *input* menjadi *output* (Archer, 2001). Sistem politik internasional tidak memiliki pemerintahan pusat sehingga organisasi internasional dapat berperan dalam berbagai bidang seperti yang dilakukan oleh pemerintah di negara berdaulat. Organisasi internasional dapat berfungsi dalam mengartikulasikan kepentingan aktor, menciptakan norma, melakukan perekrutan anggota, melakukan sosialisasi terhadap nilai yang mereka anut, melakukan kegiatan operasional, menyediakan informasi, dan membuat, menerapkan, serta mengesahkan kebijakan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai fungsi apa saja yang dipenuhi oleh UN Women dalam membantu Uganda untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi perempuan.

3.1 Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Fungsi pertama yang akan dibahas adalah bagaimana suatu organisasi internasional dapat menjadi instrumen untuk artikulasi dan agregasi kepentingan bagi anggotanya (Archer, 2001). Archer menuliskan bagaimana suatu organisasi dapat menjadi forum di mana suatu kepentingan diartikulasikan, atau mereka juga dapat mengartikulasikan kepentingan tertentu secara terpisah dari kepentingan anggotanya (Archer, 2001). Sistem politik internasional yang tidak memiliki suatu otoritas

pusat membuat negara seringkali kesulitan mengartikulasikan kepentingannya. Organisasi internasional dapat membantu untuk memastikan kepentingan tersebut dapat tercapai, tanpa melanggar kepentingan kolektif dari negara-negara lainnya.

Uganda memiliki permasalahan di bidang kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan yang cukup serius akibat konflik dan perang sipil yang pernah terjadi di masa lalu. Meski kini sistem pemerintahan Uganda sudah lebih ramah gender, namun mereka masih membutuhkan bantuan untuk mengatasi permasalahan gender yang tersisa. UN Women kemudian dipilih menjadi salah satu partner Uganda untuk mencapai tujuannya. UN Women memenuhi fungsi artikulasi dan agregasi kepentingannya dengan menampung dan menyampaikan kepentingan perempuan yang terdampak perang dengan *The Lord's Resistance Army* (LRA) di daerah Uganda bagian utara. Pada kesempatan ini UN Women mengadakan pertemuan yang mempertemukan perwakilan pemerintah, PBB, donor, kelompok perempuan dan korban, hingga masyarakat sipil (UN Women, 2014).

Forum yang dibuat oleh UN Women kemudian menjadi tempat bagi pemerintah Uganda dan korban terdampak perang LRA untuk mendiskusikan jalan keluar bagi masalah tersebut. Seperti yang telah dibahas di dalam peran UN Women sebagai aktor independen, parlemen Uganda kemudian mengeluarkan resolusi guna mendesak pemerintah Uganda agar memperhatikan pemulihan dan rehabilitasi korban perang LRA, serta meningkatkan pembangunan dan investasi ke masyarakat

korban perang LRA (UN Women, 2014). Keberhasilan ini kemudian menandai fungsi UN Women sebagai forum untuk artikulasi dan agregasi kepentingan bagi Uganda, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Archer.

3.2 Norma

Salah satu fungsi organisasi internasional dalam institusi dunia adalah membantu menciptakan norma yang berperan penting dalam hubungan internasional (Archer, 2001). Norma tersebut muncul dari pembentukan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi internasional tertentu, hingga menjadi suatu aturan. Organisasi internasional yang terdiri dari pengurus dan staf yang profesional di bidangnya berkontribusi sebagai pembentuk norma dan aturan. Meski demikian, karena dibentuk di tingkat organisasi, aturan ini cenderung lemah dan mengandung beberapa bagian yang mungkin kontradiktif (Archer, 2001). Norma tersebut biasanya juga bukan terbentuk sepenuhnya karena kuasa organisasi internasional, namun juga atas kesepakatan anggotanya.

UN Women sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tentunya membawa norma yang sejalan dengan tujuan pembentukannya. Sebagai bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), norma-norma yang dijalankan oleh UN Women berdasarkan pada norma yang berlaku di PBB. Sebelum UN Women terbentuk, PBB sudah terlebih dahulu menciptakan norma dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan gender seperti *Beijing Declaration and Platform for Action* serta *the Convention on the Elimination of All Forms*

of Discrimination against Women (CEDAW) (UN Women, 2021). Ketika UN Women sudah terbentuk, deklarasi serta perjanjian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menciptakan norma, kebijakan, serta suatu standar global yang dinamis di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2021). Standar tersebut yang kemudian menjadi parameter bagi anggota UN Women untuk mencapai keadilan gender dan perempuan yang sejahtera dalam masyarakat.

Beberapa standar yang ditetapkan oleh UN Women tersebut, antara lain:

- Perempuan dapat memimpin, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan (UN Women, 2021).
- Perempuan memiliki pendapatan yang terjamin, pekerjaan yang layak dan dapat mengatur keuangannya sendiri (UN Women, 2021).
- Perempuan dari semua usia dapat menjalani kehidupan yang bebas tanpa kekerasan dalam bentuk apapun (UN Women, 2021).
- Perempuan berkontribusi terhadap pembangunan perdamaian dan ketahanan yang berkelanjutan, dan mendapatkan manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik, serta aksi kemanusiaan (UN Women, 2021).

Norma tersebut banyak membantu Uganda sebagai patokan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negaranya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh UN Women adalah *Young Women and Leadership Project (YWLP)*. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pelatihan kepemimpinan bagi perempuan muda dari 10 distrik di

seluruh daerah Uganda. 50 partisipan pertama untuk proyek ini berasal dari Kamuli, Agago, Gulu, Kitgum, Pader, Kaabong, Kotido, Lamwo, Kaberamaido dan Moroto (UN Women, 2017). Proyek ini berupaya untuk memberikan pelatihan bagi perempuan muda agar dapat menjadi sosok pemimpin yang berkomitmen terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender (UN Women, 2017).

Kesadaran Uganda akan pentingnya pemberdayaan perempuan didukung oleh program ini dengan melakukan pelatihan yang meliputi berbagai macam hal, diantaranya adalah pemahaman gender, gender dan pemerintahan, kepemimpinan transformasional, hingga tata kelola dan keterampilan memimpin (UN Women, 2017). Mereka meyakini bahwa harus ada peran setara yang dimainkan oleh laki-laki perempuan agar perdamaian dan pembangunan dapat tercapai (UN Women, 2017). Program tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan berhasil melibatkan banyak perempuan dalam prosesnya. Terdaftar 150 perempuan muda yang berpartisipasi setiap tahunnya, untuk kemudian mengaplikasikan ilmu dan kemampuan yang diajarkan dalam proses politik dan pengambilan keputusan di Uganda.

Pada tahun 2020 saja, ada tiga perempuan yang berhasil menduduki posisi politik dari 30 calon yang ada (UN Women, 2021). Pelatihan ini akan lebih digiatkan kembali di tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Dibatasinya interaksi membuat kampanye pemilu 2021 banyak menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, hingga internet. Perempuan Uganda yang kebanyakan berpenghasilan rendah akan

lebih sulit mengakses media tersebut dan berpartisipasi pada pemilu tahun ini, sehingga program ini juga akan fokus untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, program tersebut berupaya memenuhi poin pertama dari standar norma yang dibentuk oleh UN Women, yaitu mengupayakan agar perempuan dapat memimpin, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan Uganda. Sehingga sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Archer bahwa fungsi organisasi internasional sebagai norma adalah dengan membantu menciptakan

3.3 Rekrutmen

Organisasi internasional dapat melakukan fungsi penting berkaitan dengan rekrutmen anggota dalam sistem politik internasional (Archer, 2001). Keanggotaan IGO yang biasanya hanya terdiri dari negara yang berdaulat, misalnya, dapat menjadi pendorong bagi negara-negara yang belum merdeka untuk meraih kedaulatannya dan bergabung ke dalam IGO tersebut (Archer, 2001). Hal tersebut juga membuat IGO dianggap penting bagi negara untuk memenuhi kepentingan nasional mereka. Fungsi rekrutmen akan lebih banyak dijalankan oleh INGO, karena keanggotaannya yang cenderung lebih universal. INGO dapat diikuti oleh individu dan kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan yang sama, sehingga dalam waktu yang sama dapat merekrut anggota baru dalam sistem politik internasional.

Sebagai bagian dari PBB, maka anggota UN Women sama dengan anggota PBB. Syarat keanggotaan PBB selain harus merupakan negara

berdaulat, juga tercantum dalam Piagam PBB yaitu “negara cinta damai yang menerima kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB, dan menurut penilaian organisasi dapat melaksanakan kewajiban tersebut” (United Nations, 2021). UN Women bertugas untuk mendukung anggota PBB untuk mencapai standar kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan global yang mereka tetapkan. Meski demikian, UN Women tidak dapat secara efektif membantu negara yang tidak menunjukkan komitmen dalam memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Uganda merupakan negara yang memiliki kesadaran akan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang cukup tinggi, sehingga menyadari pentingnya bantuan UN Women dalam mengatasi permasalahan gender. Uganda juga menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dan *Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa* atau yang biasa disebut *Maputo Protocol*. Hal tersebut membuat kerja sama antara Uganda dan UN Women terjalin semakin erat. Kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Uganda dapat menjadi motivasi bagi negara-negara lain yang belum fokus pada masalah gender untuk turut berkomitmen dan menjalin kerja sama dengan UN Women. Semakin banyak negara yang bekerja sama, maka semakin banyak pula koneksi anggota yang dapat Uganda manfaatkan demi melancarkan kepentingan nasionalnya. Uganda kemudian dapat menggunakan UN Women untuk

membuat forum yang mempertemukan anggotanya, lalu mendapatkan semakin banyak informasi seiring dengan bertambahnya anggota dalam UN Women. Melalui hal ini, maka UN Women berhasil menjalankan fungsinya dalam perekrutan anggota pada sistem politik internasional sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Archer.

3.4 Sosialisasi

Fungsi sosialisasi yang dimaksud oleh Archer adalah bagaimana suatu organisasi internasional dapat melakukan sosialisasi atas suatu norma atau nilai yang mereka anut di negara anggota (Archer, 2001). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat atas nilai-nilai yang berlaku dalam sistem organisasi tersebut (Archer, 2001). Berkaca pada fungsi norma yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa norma dan aturan yang berlaku di suatu organisasi internasional cenderung bersifat lemah dan tidak mengikat. Oleh karena itu kemudian perlu dilakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai dalam suatu organisasi internasional untuk memastikan seluruh anggota dapat memahami dan mematuhi.

UN Women banyak membantu pemerintah Uganda untuk mempromosikan nilai-nilai pemberdayaan perempuan pada masyarakat. Fungsi ini dibutuhkan masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, setara, serta ramah perempuan. Kesadaran ini diharapkan dapat mendukung kerja pemerintah di skala yang lebih besar, seperti contohnya pada pembuatan kebijakan. UN Women memiliki berbagai cara untuk melakukan sosialisasi, namun

yang paling unik yaitu melalui perayaan hari besar. Cara ini digunakan untuk menarik perhatian masyarakat umum, sehingga pesan atau nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat menjangkau lebih luas.

Perayaan *International Rural Women's Day* pada tahun 2017 di Distrik Gulu, Uganda Utara dilakukan oleh UN Women untuk mengedukasi masyarakat, terutama perempuan, mengenai pentingnya akses dan penggunaan layanan keuangan berkualitas tinggi (UN Women, 2017). Penting bagi perempuan terutama yang berpenghasilan rendah untuk menggunakan layanan keuangan seperti bank, agar negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif (UN Women, 2017). Perempuan yang hidup di daerah pedesaan umumnya bekerja sebagai petani, sehingga mengakses layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, hingga asuransi dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas peluang ekonomi mereka (UN Women, 2017). Selain mengedukasi masyarakat, UN Women juga menyerukan rekomendasinya kepada layanan perbankan, agar menyediakan produk keuangan yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Acara tersebut diramaikan dengan adanya berbagai hiburan seperti pawai, tari, drama, pidato, hingga pameran berbagai produk. Selain masyarakat, lembaga keuangan juga datang untuk memberikan informasi terkait produk atau jasanya, sehingga sejalan dengan tujuan awal dilaksanakannya perayaan ini. Diharapkan melalui acara ini, masyarakat Gulu dapat menerima salah satu nilai yang dianut oleh UN Women, yaitu perempuan harus memiliki pendapatan yang terjamin, pekerjaan yang

layak, serta dapat mengatur keuangannya sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu usaha UN Women untuk memenuhi fungsi sosialisasi yang dikemukakan oleh Archer, yaitu dengan membantu Uganda untuk mempromosikan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

3.5 Pembuatan dan Pengesahan Kebijakan

Organisasi internasional dapat berfungsi dalam proses pembuatan kebijakan yang dipatuhi oleh anggotanya. Fungsi ini muncul dikarenakan sistem politik internasional tidak memiliki institusi pembuatan kebijakan yang formal dan terpusat (Archer, 2001). Hal tersebut membuat sumber aturan yang ada dalam sistem politik internasional lebih beragam (Archer, 2001). Aturan tersebut dapat berasal dari praktik di masa lalu yang telah turun temurun, perjanjian hukum antar negara, ataupun dari organisasi internasional (Archer, 2001). Berdasarkan proses pembuatan kebijakannya, terdapat organisasi internasional yang tujuannya memang untuk menyusun kebijakan, dan ada yang tidak semata-mata dibuat untuk menyusun kebijakan, tetapi memiliki elemen pembuatan kebijakan pada strukturnya (Archer, 2001).

Fungsi penerapan kebijakan merupakan lanjutan dari pembuatan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang membedakan adalah jika pembuatan kebijakan dilakukan oleh organisasi internasional, penerapan kebijakan sangat bergantung pada negara (Archer, 2001). Organisasi internasional hanya dapat melakukan pengawasan untuk memastikan aturan yang telah dibuat dapat diikuti dan diterapkan oleh

anggotanya di level domestik. Beberapa organisasi internasional dapat memberikan sanksi ketika aturannya tidak diterapkan dengan baik, tetapi sebagian besar organisasi internasional tidak dapat menghukum pelanggar aturan dengan tegas.

Dalam melaksanakan fungsinya di Uganda, UN Women memang tidak secara resmi menerbitkan suatu aturan yang bersifat formal dan mengikat anggotanya. Akan tetapi, sebagai suatu organisasi internasional yang dapat berperan sebagai aktor independen, UN Women memiliki agenda yang menjadi dasar kebijakan dalam melakukan kegiatan di Uganda, di antaranya adalah sebagai berikut (UN Women, 2020):

- Perempuan memimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan (UN Women, 2020),
- Perempuan diberdayakan secara ekonomi dan mendapat manfaat dari pembangunan (UN Women, 2020),
- Perempuan dan anak perempuan menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan (UN Women, 2020),
- Perdamaian, keamanan, dan aksi kemanusiaan dibentuk oleh kepemimpinan dan partisipasi perempuan (UN Women, 2020),
- Tata kelola dan perencanaan nasional sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas untuk komitmen dan prioritas kesetaraan gender (UN Women, 2020).

Setelah memenuhi fungsinya sebagai pembuat kebijakan, UN Women kemudian melaksanakan fungsinya dalam penerapan kebijakan dengan memastikan bahwa agenda tersebut dapat diterapkan oleh

pemerintah Uganda. UN Women berupaya dengan cara membuat pertemuan dengan pemerintah Uganda untuk membicarakan agenda kedua, yaitu perempuan harus diberdayakan secara ekonomi (UN Women, 2019). Agenda tersebut kemudian diwujudkan oleh Uganda, salah satunya adalah melalui *Uganda Women Entrepreneurship Programme (UWEP)*. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi perempuan dan membekali mereka dengan keterampilan untuk memajukan usaha, pemasaran produk dan layanan mereka (UN Women, 2019).

Program tersebut menunjukkan kemajuan yang berarti karena berhasil membukakan peluang bagi perempuan untuk memasok barang dan jasa pada pemerintah di berbagai sektor. Salah satunya adalah perempuan dari distrik Lira yang mampu memasok hingga 18.000 sapi dengan nilai kontrak hingga 3 miliar shilling Uganda. Hal tersebut kemudian sejalan dengan agenda kedua yang dibuat oleh UN Women, yaitu perempuan diberdayakan secara ekonomi dan mendapat manfaat dari pembangunan (UN Women, 2020). Sesuai dengan definisi Archer bahwa organisasi internasional dapat berfungsi dalam pembuatan kebijakan yang dipatuhi oleh anggotanya, UN Women juga berhasil berfungsi dalam pembuatan agenda yang berperan dalam pemberdayaan perempuan di Uganda. Selain itu, UN Women juga menjalankan fungsinya dalam penerapan kebijakan, karena Uganda membuat UWEP sebagai bentuk kepatuhan terhadap agenda yang dibuat oleh UN Women.

3.6 Informasi

Fungsi organisasi internasional ini seringkali masih menjadi perdebatan sejak kemunculannya, dikarenakan dianggap tidak cukup penting dan tidak berpengaruh secara langsung terhadap sistem. Namun, perlu diingat bahwa organisasi internasional memiliki fungsi penting sebagai media informasi. Organisasi internasional sebagai penyedia informasi dapat dilihat dari banyaknya materi cetak yang mereka hasilkan (Archer, 2001). Materi tersebut dapat menjadi sumber informasi yang sangat berguna karena didapatkan melalui penelitian oleh pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Informasi tersebut juga biasanya tersedia untuk masyarakat umum dan mudah diakses, salah satunya adalah dengan melalui web resmi milik organisasi yang bersangkutan. Informasi yang disediakan oleh organisasi internasional juga lebih dipercayai oleh masyarakat umum karena dianggap tidak memihak dan lebih sedikit kemungkinannya untuk disensor (Archer, 2001).

UN Women memenuhi fungsinya sebagai penyedia informasi bagi Uganda dengan menerbitkan materi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Fungsi ini sangat dibutuhkan oleh Uganda karena meski sudah cukup sadar gender, namun pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi masalah pemberdayaan perempuan, termasuk sumber informasi. UN Women melakukan penelitian di banyak negara pada sektor yang berbeda-beda, sehingga dapat menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat. Informasi yang paling bermanfaat bagi Uganda adalah materi mengenai permasalahan di dalam negerinya sendiri.

Informasi tersebut dapat membantu Uganda untuk memetakan langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain laporan penelitian yang berskala besar, UN Women juga rutin menerbitkan berita mengenai program-program yang sedang mereka jalankan di Uganda, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui keadaan negara tersebut. Informasi yang diberikan oleh UN Women juga dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum melalui situs resmi yang telah disediakan. Sehingga bukan hanya pemerintah saja yang dapat memanfaatkannya, namun para peneliti maupun cendekiawan Uganda dapat menggunakan informasi yang disediakan dengan mudah.

Salah satu materi informasi penting dari UN Women yang digunakan oleh pemerintah Uganda adalah laporan dengan judul “*The Cost of the Gender Gap in Agricultural Productivity in Malawi, Tanzania, and Uganda*”. Laporan tersebut ditulis oleh UN Women berkolaborasi dengan United Nations Development Programme – United Nations Environment Programme Poverty-Environment Initiative (UNDP-UNEP PEI) Africa, serta World Bank. Laporan tersebut berusaha menunjukkan pengaruh yang akan muncul jika masalah kesenjangan gender dalam pertanian di ketiga negara tersebut ditangani dengan baik (UN Women, et.al., 2015). Informasi yang disediakan di dalamnya cukup beragam, mulai dari penjelasan mengenai kesenjangan gender, keadaan negara-negara yang mengalami masalah tersebut, serta identifikasi faktor yang mengakibatkan ketimpangan gender di bidang ekonomi. Tidak hanya menyajikan informasi, laporan ini juga memberikan rekomendasi

mengenai solusi yang dapat diusahakan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi kesenjangan gender di bidang ekonomi (UN Women, et.al, 2015).

Uganda kemudian memanfaatkan laporan tersebut sebagai salah satu sumber informasi untuk menyusun strategi guna mengatasi kesenjangan gender pada bidang ekonomi di negaranya. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Uganda berhasil mengimplementasikan solusi untuk mengatasi kesenjangan gender di bidang ekonomi. Dengan ini, salah satu hambatan terbesar Uganda dalam mengupayakan kesejahteraan perempuan di negaranya berhasil diatasi. UN Women memenuhi fungsinya dengan menyediakan sumber informasi yang dapat digunakan oleh Uganda untuk mengatasi masalah kesejahteraan perempuan dan kesetaraan gender di negaranya. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Archer, yaitu organisasi internasional menjadi penyedia informasi bagi anggotanya.

3.7 Operasional

Organisasi internasional menjalankan beberapa fungsi operasional, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah (Archer, 2001). Operasi yang mereka lakukan beragam, tergantung dengan bidang dan tujuan dari organisasi internasional tersebut. UN Women memenuhi fungsi operasionalnya dengan memberikan bantuan terhadap Uganda, terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan. Meski Uganda merupakan negara yang cukup sadar gender dibandingkan dengan negara-negara di Afrika lainnya, namun mereka tetap membutuhkan bantuan dari pihak luar seperti UN Women. Bantuan ini dapat berupa operasi, program, maupun

proyek yang dapat membantu perempuan di Uganda untuk mencapai kesejahteraannya.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh UN Women sebagai kegiatan operasional dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda adalah *“Increase of Women Economic Empowerment through Cage Fish Farming”*. Proyek ini menargetkan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui budidaya perairan, bagi 1400 perempuan yang tinggal di Distrik Bugiri, Uganda Timur (Standard Bank, 2021). Proyek ini tentu dapat menjadi angin segar bagi Uganda yang selama ini fokus mengembangkan ekonominya di bidang agraris. Tempat pelaksanaan yang dipilih juga tepat karena Bugiri memiliki kawasan perairan yang cukup luas.

Proyek yang telah berjalan sejak awal 2019 tersebut, sejauh ini telah berhasil membekali 700 wanita dengan keterampilan dan teknologi budidaya perairan yang dibutuhkan (Standard Bank, 2021). Bantuan yang diberikan oleh UN Women antara lain adalah pelatihan teknis, bimbingan, hingga akses pada makanan, akomodasi dan keterampilan manajemen bisnis (Standard Bank, 2021). Keberhasilan proyek ini membuat kloter kedua dibanjiri hingga 800 pendaftar, meski kuota yang tersisa hanya untuk 700 orang saja. Saat ini proyek tersebut memang terhambat karena pandemi COVID-19, namun UN Women sedang mencari cara untuk menyiasatinya, misalnya dengan menyiapkan bimbingan jarak jauh (Standard Bank, 2021). Melihat keberhasilan di pelaksanaan yang lalu, maka cukup diyakini bahwa pandemi COVID-19 tidak akan banyak menghambat keberhasilan program ini.

Masih berkaitan dengan program peningkatan perekonomian, program lain yang *Karamoja Economic Empowerment Project (KEEP)* menjadi fokus lain UN Women dalam memberikan dukungan kepada remaja di bawah Katikekile Youth Group (KYG). Proyek ini bertujuan untuk membantu perempuan dan gadis berusia 15-24 tahun yang rentan terhadap HIV (United Nations Uganda, 2020). UN Women berupaya untuk memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, sekaligus memberikan kemampuan bagi kelompok remaja tersebut untuk memperoleh pendapatan (United Nations Uganda, 2020). Anggota KYG merupakan remaja yang beresiko HIV, penderita HIV/AIDS, putus sekolah hingga korban kekerasan. Dengan memberikan bimbingan serta pelatihan dalam memperoleh penghasilan, diharapkan dapat mengurangi kerentanan kelompok remaja tersebut terhadap penyakit HIV/AIDS.

KEEP memberikan pelatihan keterampilan bagi Katikekile Youth Group serta hibah berupa dana untuk mengembangkan usaha. Usaha yang telah secara rutin dijalankan adalah pembuatan *sweater* skala kecil (United Nations Uganda, 2020). Selain itu, pasca pandemi COVID-19, KEEP memanfaatkan momentum dengan memproduksi masker bagi pasar lokal (United Nations Uganda, 2020). Tidak hanya memberikan pelatihan usaha, proyek ini juga menyediakan konseling untuk membantu korban untuk memulihkan trauma mereka. Selain membantu mengembangkan perekonomian Uganda, program ini juga turut andil dalam mencapai poin kelima dari SDGs yang menjadi tujuan Uganda, yaitu masyarakat perempuan yang berdaya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bagaimana UN Women menjalankan fungsi operasionalnya. Sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Archer, fungsi operasional suatu organisasi internasional bergantung pada tujuan dan bidang yang digeluti oleh organisasi tersebut. UN Women bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sehingga melaksanakan proyek *“Increase of Women Economic Empowerment through Cage Fish Farming”* dan *Karamoja Economic Empowerment Project* dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan Uganda.



BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Uganda merupakan negara dengan sejarah konflik panjang, yang menyisakan kondisi memprihatinkan bagi masyarakat terutama perempuan. Sebagai negara yang mengamalkan nilai-nilai tradisi, perempuan di Uganda juga banyak teropresi oleh beberapa tradisi tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, Uganda sudah lebih terbuka dan menyadari pentingnya pemberdayaan perempuan untuk memajukan negara. Meski demikian, Uganda belum memiliki cukup kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi kesejahteraan perempuan yang merata. Oleh karena itu, Uganda menggandeng UN Women sebagai partner untuk mencapai masyarakat perempuan yang berdaya. Untuk itu, penulis mencoba menganalisis bagaimana UN Women kemudian melakukan peran dan fungsinya di Uganda dengan menggunakan konsep organisasi internasional oleh Clive Archer.

Pada bab II penulis membahas mengenai dua peran organisasi internasional yang berhasil dipenuhi oleh UN Women, yaitu sebagai instrument, arena, dan aktor independen. Peran sebagai instrumen berarti Uganda menggunakan UN Women sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam menjalankan peran sebagai instrumen, UN Women membantu Uganda untuk menyusun strategi guna mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pertanian. *Gender and Equity Compact for the Agriculture Sector*

(GECAS) berhasil berdiri atas kerjasama UN Women dengan pemerintah Uganda dan menghasilkan rancangan upaya untuk mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian. UN Women juga menjadi instrumen Uganda dengan melakukan pendampingan terhadap implementasi dan lokalisasi SDGs. Bantuan yang diberikan oleh UN Women meliputi data yang diperlukan serta kapasitas sumber daya. Upaya tersebut membuahkan hasil karena hingga 76% target SDGs berhasil diarusutamakan ke dalam National Development Plan (NDP II).

Peran UN Women selanjutnya adalah sebagai arena. UN Women memenuhi peran tersebut dengan memfasilitasi pertemuan yang bertemakan *“Financing for Gender Equality - Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa”*. Pertemuan ini membahas mengenai pembiayaan untuk upaya pemberdayaan perempuan, yang diikuti oleh Uganda dan seluruh anggota UN Women. Forum tersebut juga membahas mengenai pentingnya lokalisasi SDGs dan memberi kesempatan bagi seluruh peserta untuk memberikan informasi terkait upaya pemberdayaan perempuan dan lokalisasi SDGs di negaranya masing-masing. Pertemuan ini berhasil membantu Uganda mendapatkan informasi terkait strategi pendanaan usaha pemberdayaan perempuan dan lokalisasi SDGs seperti apa yang harus mereka lakukan.

Peran UN Women yang ketiga adalah sebagai aktor independen. UN Women memenuhi perannya di Uganda dengan cara mendesak pemerintah untuk melakukan pembentukan program khusus bagi korban yang terdampak perang LRA di Uganda bagian utara. Upaya tersebut

membuahkan hasil ketika parlemen mengeluarkan resolusi, yang sisinya mendesak pemerintah Uganda untuk memberikan bantuan dana dan segala jenis dukungan yang dapat membantu korban untuk pulih. Pemerintah diminta untuk memperhatikan pemulihan dan rehabilitasi korban perang LRA, serta meningkatkan pembangunan dan investasi ke masyarakat korban perang LRA. Hal ini membuat UN Women menjadi aktor independen karena dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah Uganda.

Di bab III dari tulisan ini, penulis masuk ke pembahasan mengenai enam dari sembilan fungsi organisasi internasional yang berhasil dipenuhi oleh UN Women. Fungsi tersebut meliputi artikulasi dan agregasi kepentingan, norma, rekrutmen, sosialisasi, informasi, serta operasional. *Pertama*, fungsi artikulasi dan agregasi dipenuhi oleh UN Women dengan mengartikulasikan kepentingan dari perempuan terdampak perang dengan *The Lord's Resistance Army* (LRA) kepada pemerintah Uganda. UN Women memenuhi fungsi norma dengan membantu menciptakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women juga menetapkan standar global yang dapat dipenuhi negara untuk dapat mewujudkan masyarakat perempuan yang setara dan sejahtera.

Ketiga, UN Women menjalankan kerja sama dengan berbagai negara untuk menjalankan fungsi rekrutmen. Kemajuan Uganda di bidang pemberdayaan perempuan dapat menjadi pemicu negara-negara lain untuk turut berkolaborasi dengan UN Women dalam mengatasi permasalahan

gender. Semakin banyak negara yang ikut bekerja sama, maka semakin banyak pula anggota baru yang berhasil direkrut UN Women pada sistem politik internasional, dan akan ada semakin banyak negara yang dapat dimanfaatkan Uganda untuk memenuhi kepentingannya melalui UN Women. *Keempat*, UN Women melakukan sosialisasi mengenai nilai dan norma yang dianut, kepada negara-negara anggotanya. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah mengadakan perayaan *International Rural Women's Day* di Distrik Gulu, Uganda Utara. Meski berbentuk seperti festival, tetapi UN Women menyelipkan pesan mengenai pentingnya penggunaan layanan keuangan bagi petani perempuan. Bentuk sosialisasi semacam ini dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat pedesaan.

Kelima, UN Women memenuhi fungsi penting dalam pembuatan dan penerapan kebijakan. UN Women membuat agenda yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, salah satunya mengenai perempuan yang harus diberdayakan secara ekonomi. Agenda tersebut berhasil diterapkan di bawah pengawasan UN Women, melalui UWEP. *Keenam*, UN Women memenuhi fungsi sebagai penyedia informasi bagi Uganda dengan melakukan penelitian dan menerbitkan laporan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Hambatan Uganda dalam mengatasi permasalahan gender umumnya dikarenakan keterbatasan data serta informasi yang dibutuhkan, sehingga fungsi UN Women tersebut sangat bermanfaat bagi kelanjutan program kerja pemerintah Uganda. *Terakhir*, UN Women menjalankan fungsi

operasional dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh Uganda terkait permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bantuan yang diberikan dapat berbentuk operasi, proyek, maupun program tertentu yang masih berkaitan dengan tujuan awal. Salah satunya adalah proyek *“Increase of Women Economic Empowerment Through Cage Fish Farming”* yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di bidang perairan, dengan memberi pembekalan kepada 1400 nelayan wanita setempat.

Secara garis besar, penulis dapat melihat besarnya peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 hingga 2021. Kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sudah semakin terlihat. Meski demikian, kemajuan tersebut tidak mungkin dapat dicapai jika Uganda tidak terbuka terhadap perubahan dan menyadari pentingnya masyarakat yang setara dan sejahtera. Uganda yang menyadari kekurangannya dan mengajak UN Women untuk berkolaborasi, membuat perempuan di Uganda dapat lebih sejahtera dan setara dengan laki-laki dalam berbagai sektor.

Tabel 3. Kesimpulan Peran dan Fungsi UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda

Klasifikasi	Indikator	Analisis
	Instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu menyusun strategi guna mengatasi kesenjangan gender di bidang pertanian - Melakukan pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi SDGs

Peran	Arena	Mengadakan pertemuan bertemakan “ <i>Financing for Gender Equality - Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa</i> ” guna membantu Uganda untuk mendapatkan informasi terkait pendampingan dan lokalisasi SDGs yang diperlukan
	Aktor Independen	Membantu mendesak parlemen Uganda untuk mengeluarkan resolusi guna menuntut pembentukan program khusus untuk korban yang terdampak perang LRA
Fungsi	Artikulasi dan Agregasi kepentingan	Membantu mengartikulasikan kepentingan dari perempuan terdampak perang dengan <i>The Lord’s Resistance Army (LRA)</i> kepada pemerintah Uganda
	Norma	Membantu menciptakan norma yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan
	Rekrutmen	Membantu merekrut semakin banyak anggota baru dalam politik internasional, untuk dapat dimanfaatkan Uganda untuk memenuhi kepentingannya
	Sosialisasi	Mengadakan perayaan hari besar seperti International Women’s Day sebagai salah satu upaya untuk membuat norma yang mereka anut dapat diterima oleh masyarakat
	Pembuatan dan Penerapan Kebijakan	Membuat agenda yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, salah satunya mengenai perempuan yang harus diberdayakan secara ekonomi. Agenda tersebut berhasil diterapkan di bawah pengawasan UN Women, melalui UWEP

	Informasi	Menjadi penyedia informasi dengan melakukan penelitian dan menerbitkan laporan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan
	Operasional	Memberikan bantuan berupa proyek yaitu <i>“Increase of Women Economic Empowerment Through Cage Fish Farming”</i> dan <i>Young Women and Leadership Project (YWLP)</i> guna mengupayakan pemberdayaan perempuan

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dari tulisan yang telah dibuat, terlebih mengenai keterbatasan data penelitian. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama, maka penulis akan merekomendasikan untuk membahas peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda setelah tahun 2021, karena program yang dilakukan akan semakin banyak mengingat Uganda perlu bangkit pasca pandemi COVID-19. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan mengenai hambatan yang dihadapi UN Women dalam melaksanakan peran dan fungsinya di Uganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhram-Lodhi, A. H. (2018). *Factors Driving the Gender Gap in Agricultural Productivity: Uganda*. UN Women.
- Archer, C. (2001). *International Organizations Third Edition*. New York: Routledge.
- Bandiera, O., Buehren, N., Burgess, R., Goldstein, M., Gulesci, S., Rasul, I., et al. (2018). Women's Empowerment in Action: Evidence from a Randomized Control Trial in Africa. 1 - 42.
- Boyd, R. E. (1989). Empowerment of Women in Uganda: Real or Symbolic. *Review of African Political Economy, No.45/46*, 106-117.
- Burchil, S. (2005). *Theory of International Relations*. Houndmills: MACMILLAN.
- Ellis, A., Manuel, C., & Blackden, C. M. (2006). *Economic Growth in Uganda: Unleashing the Power of Women*. Washington: The World Bank.
- EOC & UN Women. (2017). *Gender and Equity Compact for the Agriculture Sector 2016/2017 - 2019/2020*. Kampala: UN Women.
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- International IDEA. (2021). *Women Political Participation: Africa Barometer 2021*. Stockholm: International IDEA.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change Vol. 30*, 435 - 464.
- Kadaga, R. (2013). Women's Political Leadership in East Africa with Specific Reference to Uganda. *Commonwealth Governance Handbook*, 32 - 36.
- Liberta, M. (2012). The Contribution of Women Organizations to the Economic Empowerment of Craftswomen: Case Study of The National Association of Women Organizations in Uganda. *Rwanda Journal Vol.26 Series B*, 93 -102 .
- Mengo, C., Okumu, M., Ombayo, B., Nahar, S., & Small, E. (2019). Marital Rape and HIV Risk in Uganda: The Impact of Women's Empowerment Factors. *Violence Against Women, 25(15)*, 1783-1805.
- Myrdal, G. (1955). *Realities & Illusions in Regard to Inter-governmental Organizations*. Oxford: Oxford University Press.

- Ottemoeller, D. (1999). The Politics of Gender in Uganda: Symbolism in the Service of Pragmatism. *African Studies Review*, Vol. 42, No. 2, 87-104.
- Rice, X. (2007, October 20). *Background: the Lord's Resistance Army*. Retrieved February 21, 2021, from The Guardian Website: <https://www.theguardian.com/katine/2007/oct/20/about.uganda>
- Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia*. London: Oxford University Press.
- Sen, G., & Grown, C. (1985). *Development, crises and alternative visions: third world women's perspectives*. Norway: Media-Redaksjonen and DAWN.
- Standard Bank. (2021, February 15). *UN Women Uganda and Stanbic Equip Women Farmers for Long-term Success*. Retrieved March 2, 2021, from Reuters Website: <https://www.reuters.com/article/sponsored/un-women-uganda-stanbic>
- UBOS. (2014). *Uganda National Household Survey 2012/2013*. Kampala: UBOS.
- UN Women. (2014, April 23). *Ugandan Parliament adopts resolution to address needs of war-affected women*. Retrieved February 21, 2021, from UN Women Website: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/4/ugandan-parliament-adopts-resolution-to-address-needs-of-war-affected-women>
- UN Women. (2015, July 14). *UN Women steers three high-level side events at the Financing for Development Conference*. Retrieved February 21, 2021, from UN Women Website: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/7/un-women-steers-three-high-level-side-events-at-the-financing-for-development-conference>
- UN Women. (2016). *Transforming Equality: UN Women in Eastern and Southern Africa*. Nairobi: Colourprint Limited.
- UN Women. (2017). *Accelerating the Implementation of Agenda 2030 on Sustainable Development: Approaches by African Countries in the Localization and Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs)*. Africa: UN Women .
- UN Women. (2017, November 5). *UN Women Offers Mentorship for Aspiring Young Women Leaders*. Retrieved March 12, 2021, from UN Women Africa Website: <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/11/un-women-offers-mentorship-for--aspiring-young-women-leaders>
- UN Women. (2017, December 15). *UN Women Uganda Celebrates the International Rural Women's Day 2017 With a Call for Financial Inclusion*. Retrieved March 26, 2021, from UN Women Africa Website:

<https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/12/rural-women-day>

UN Women. (2019, March 14). *Uganda celebrates International Women's Day*. Retrieved May 6, 2021, from UN Women Africa Website: <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/03/iwd-uganda>

UN Women. (2020, February 21). *Governance and National Planning*. Retrieved from UN Women Africa Website: <https://africa.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning>

UN Women. (2020, December 28). *Where We Are: Uganda*. Retrieved December 28, 2020, from UN Women Africa Website: <https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/uganda>

UN Women. (2021, March 3). *Mentoring programme in Northern Uganda brings young women into local politics*. Retrieved March 18, 2021, from UN Women Africa Website: <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/03/mentoring-programme-in-northern-uganda>

UN Women. (n.d.). *About UN Women*. Retrieved February 26, 2021, from UN Women Website: <https://africa.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

UN Women. (n.d.). *Impact Area 6: A Comprehensive and Dynamic Set of Global Norms, Policies and Standards on Gender Equality and Women's Empowerment*. Retrieved March 22, 2021, from UN Women Website: <https://www.unwomen.org/en/executive-board/strategic-plan-review/impact-area-6>

UN Women, UNDP, UNEP, World Bank Group. (2015). *The Cost of the Gender Gap in Agricultural Productivity in Malawi, Tanzania, Uganda*. UN Women.

United Nations. (n.d.). *About UN Membership*. Retrieved March 24, 2021, from United Nations Website: <https://www.un.org/en/about-us/about-un-membership>

United Nations Uganda. (2020, September 12). *How UN Women is Improving Livelihoods of Young People Living with HIV/AIDS in Moroto*. Retrieved March 22, 2021, from United Nations Uganda Website: <https://uganda.un.org/en/95216-how-un-women-improving-livelihoods-young-people-living-hivaids-moroto>

World Bank. (2020, July 23). *World Bank Provides \$150 Million to Enable More Ugandan Children to Access and Complete Secondary Education*. Retrieved May 6, 2021, from The World Bank:

<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/23/world-bank-provides-150-million-to-enable-more-ugandan-children-to-access-and-complete-secondary-education>

- World Bank. (2021, January 29). *Employment to Population Ratio Ages 15-24 (Uganda)*. Retrieved May 6, 2021, from The World Bank Website: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.1524.SP.ZS?end=2020&locations=UG&start=2001>
- World Bank. (2021, January 29). *Female Employment in Agriculture (Kenya)*. Retrieved May 2, 2021, from World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2019&locations=KE&start=2012&view=chart>
- World Bank. (2021, January 29). *Female Employment in Agriculture (Tanzania)*. Retrieved May 2, 2021, from World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2019&locations=TZ&start=2012&view=chart>
- World Bank. (2021, January 29). *Female Employment in Agriculture (Uganda)*. Retrieved May 2, 2021, from The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2019&locations=UG&start=2012&view=chart>
- World Bank. (n.d.). *GDP Uganda*. Retrieved May 3, 2021, from World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=UG&start=2000>
- World Economic Forum. (2012). *Global Gender Gap Report 2012*. Geneva: World Economic Forum.